

**PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA SOKARAJA LOR KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
FARDA NURJANAH
NIM : 1423203094

**JURUSAN EKONOMI SYAR'IAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farda Nurjanah
NIM : 1423203094
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : UPAYA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
SOKARAJA LOR KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Farda Nurjanah
NIM: 1423203094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.ainpurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SOKARAJA LOR,
KEC. SOKARAJA, KAB. BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudari **Farda Nurjanah NIM 1423203094** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S. E., M. Si
NIP. 19920613 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Im Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 01 Oktober 2021

Wakil Ketua/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Saudari Farda Nurjanah
Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Purwokerto, 17 Juni 2021

Kepada Yth.
Dekan FEBI IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan perbaikan terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Farda Nurjanah

NIM : 1423203094

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

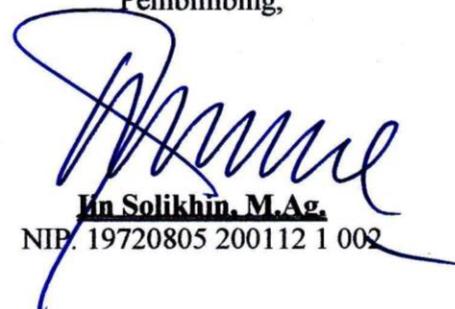
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : UPAYA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
SOKARAJA LOR KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



In Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

**PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SOKARAJA LOR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**

**Farda Nurjanah
NIM: 1423203094**

**Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah yang terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin, karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas memiliki program-program untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu bidang ekonomi bergulir, bidang sosial bergulir, dan bidang lingkungan bergulir. Peran yang dilakukan oleh BKM Mugi Rahayu dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor antara lain adalah dengan memberdayakan SDM dan memberikan dana/pinjaman untuk usaha masyarakat, dengan Program Tridaya BKM.

Kata Kunci: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pemberdayaan Masyarakat.

**THE EFFORT OF COMMUNITY INDEPENDENCE AGENCY (BKM) IN
EMPOWERING COMMUNITY IN SOKARAJA LOR VILLAGE,
SOKARAJA DISTRICT, BANYUMAS**

**Farda Nurjanah
ID Number: 1423203094**

**Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and
Business, State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto**

ABSTRACT

The concept of empowerment is a new paradigm in community development that involves the community in development activities both in planning, implementation, and evaluation. The purpose of empowerment is to shape individuals and communities to become independent. This independence includes the independence of thinking, acting, and controlling what they do.

Community development is a commitment to empowering the lower tiers of society consisting of the weak, helpless and poor, because they do not have the resources or the ability to control the means of production.

This study aims to determine the efforts of the Community Self-Sufficiency Agency (BKM) in community empowerment in Sokaraja Lor village, Sokaraja district, Banyumas district.

This research is a field research, with the type of qualitative research. Data collection techniques using observation, documentation and interviews. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis, which consists of three streams of activities that take place simultaneously, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results showed that the Mugi Rahayu Community Self-Help Agency (BKM) of Sokaraja Lor village, Sokaraja sub-district, Banyumas district had programs to empower the community, namely the revolving economic field, the rolling social sector, and the rolling environmental field. The efforts made by BKM Mugi Rahayu in empowering the community in Sokaraja Lor village include empowering human resources and providing funds/loans for community businesses, with the Tridaya BKM Program.

Keywords: Community Self-Sufficiency Agency (BKM), Community Empowerment.

MOTTO

Pada hakikatnya manusia itu baik, hanya saja cara menuju pencapaian terakhirnya saja yang berbeda beda dalam sebuah prosesnya.

Keluarga itu tidak hanya dari aliran darah sesaudara kandung, tetapi kita bisa mendapatkan keluarga dari sebuah pengenalan diri dari Organisasi, Teman, dan pengalaman.

Akal manusia akan berkata “tidak Mungkin” tetapi Allah akan merubah Ketidak Mungkinan dengan kata “Mungkin” selama kita di dunia dan sugesti Positif diri yang kita bangun.

Ketika kita menginginkan dihargai, dibantu, dimengerti Maka belajarlh untuk melakukan hal tersebut kepada Orang lain/Sesama.

Cinta Sesungguhnya adalah Cinta sang Illahi, Maka Cintailah segala sesuatu dengan secukupnya dan Janganlah larut dari Kata “Cinta” Karena kata Cinta selain dari Sang Maha hanyalah “Cinta Fana” semata.

Nilai mungkin bisa dimanipulasi tetapi Keyakinan dan kemampuan kita tidak dapat dimanipulasi, dengan adanya ketelatenan dalam kata “Belajar,Mencoba,dan Bersabar” walau perlu dengan proses terbiasa/panjang yang berujung skill diri yang bisa dijadikan Nyata adanya.

Percayalah setiap pengalaman, pemberian, dan pengujian yang kita jalani itu akan ada hikmah terindah yang Allah siapkan untuk kita. Asalkan kita senantiasa menyakini itu dan tidak berhenti untuk “Ikhtiar dan Berdoa”.

Tidak ada kata sia - sia atau terlambat dari sebuah kata “Menolong” karena hakikatnya kita “Menolong” sama halnya kita mendapatkan “PERTOLONGAN” dari campur tangan dan Ridho NYA Allah.

(MUNCANG FPA.XIX.0173).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Ibu dan bapak tercinta, Ibu Khafsah dan Bapak Achmad Mu'tamar, yang selalu mencurahkan seluruh doa, perhatian, serta ketulusan yang tak terhitung. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kedua Orangtua saya.
3. Keluarga Besar Achmad Mu'tamar (Mba, Mamas, dan Ponakan saya yang selalu ada di garda terdepan support, doa , dan perhatian nya) yang tak henti hentinya mengingatkan akan studi saya.
4. Dosen Pembimbing yang bisa dikatakan Bapak kedua setelah Bapak saya Bapak Iin Solikhin yang dengan kebesaran hati beliau membimbing saya sampai pencapaian penyelesaian studi saya.
5. Teman Angkatan Mapala saya yang serasa Saudara Kandung Isna, dan Arif yang telah mensupport selalu di garda terdepan dari beberapa garda yang ada yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Keluarga Besar KMPA "FAKTAPALA", Keluarga Besar "URUP PROJECT", Keluarga Besar KSEI IAN PURWOKERTO, Keluarga Besar KSR MARKAS PMI KAB BMS 2018, PENAMAS, DIP dan MGD (MAPALA Gunung Djati) Cirebon yang sudah menjadikan saya sampai seperti sekarang dalam prosesnya memberikan pengalaman, ilmu, dan Support system saya.
7. Temen Seperjuangan detik detik penyelesaian studi S1 saya yang sudah menjadikan pembangkit semangat saya dalam penyelesaian dan saling support system, doa terbaik untuk kalian semu.
8. Keluarga Besar FEBI yang membantu, mendorong sugesti positif, serta kesediaan dalam menyisihkan waktu untuk proses akademik terakhir saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	D'	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha	'	Ha
ء	Hamzah	H	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' Marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis 'H'

حكمة	Ditulis	Hikmah
جسية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanadang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + Ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + Ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + Wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

Vokal Rangkap

1.	Fathah + Ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + Wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

c. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



Puji syukur, *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”, yang penulis harap semoga bisa memberikan manfaat. Amin.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya dan teladan bagi seluruh umat. Beliau adalah sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan pada pola pikir manusia sehingga lebih mencintai ilmu pengetahuan, dan semoga kita termasuk bagian dari golongan yang mendapatkan syafa'atnya besok di hari akhir. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, petunjuk, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya sudah selayaknya penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor IAIN PURWOKERTO
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz. M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PWT
3. Dewi Laela Hilyatin. M.S.I., KAPRODI Ekonomi Syari'ah IAIN PWT
4. Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, saran, nasihat, arahan dan meluangkan waktunya untuk penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.
5. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha secara maksimal, tetapi tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis selalu mengharap kritik dan saran dari

siapapun yang bersifat membangun, sehingga nantinya skripsi ini benar-benar akan menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Purwokerto, 23 Juni 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Farda Nurjanah', written in a cursive style.

Farda Nurjanah
NIM: 1423203094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	17
1. Pengertian BKM.....	17
2. Tujuan BKM.....	17
3. Peran dan Fungsi BKM.....	18
4. Proses Pembentukan BKM.....	18
5. Unit-unit Pelaksana Tugas BKM.....	19
6. Tugas dan Fungsi UPK, UPL dan UPS.....	20
7. Kelompok Swadaya Masyarakat.....	21
B. Pemberdayaan Masyarakat	23
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	23

	2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	27
	3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	31
	4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	34
	5. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	40
	6. Model Pemberdayaan Masyarakat.....	43
	7. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	46
	C. Pembangunan Desa	47
	1. Pengertian Pembangunan Desa.....	47
	2. Ciri-ciri Pembangunan	49
	3. Administrasi Pembangunan	50
	4. Sasaran Pembangunan Pedesaan.....	53
	D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam	54
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	62
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	62
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	62
	D. Sumber Data	63
	E. Teknik Pengumpulan Data	63
	F. Teknik Analisis Data	66
	G. Pengujian Keabsahan Data	67
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
	A. Deskripsi Objek Penelitian	69
	B. Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	72
	C. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas .	
	D. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada BKM Mugi Rahayu di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Perspektif Ekonomi Islam	76 80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran-Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	;	Pimpinan Kolektif BKM Mugi Rahayu	71
Tabel 2	;	Sekretariat dan Unit Pengelola (UP) BKM Mugi Rahayu	72
Tabel 3	;	Badan Pengawas BKM Mugi Rahayu	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Struktur Organisasi BKM Mugi Rahayu.....	71
----------	---	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar, jika dua masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius (Tambunan, 2012: 181).

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya ditangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktifitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai. Disamping itu, kemiskinan umumnya diukur karena tingkat pendapatan yang rendah (Sumodiningrat, 1998: 26).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat miskin (*the absolut poor*). Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (Usman, 1998: 30-31).

Kemiskinan yang banyak terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan kemiskinan yang dibarengi oleh ketidakberdayaan masyarakat. Masyarakat itu pada umumnya tidak memiliki kemampuan atau daya yang cukup dalam berbagai bidang yang menyebabkannya tetap pada lingkaran kemiskinan. Pada umumnya masyarakat miskin tidak berdaya secara ekonomi,

pendidikan, politik, sosial, dan kekuasaan. Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan (Anwas, 2013: 83).

Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut (Widodo, 2015: 202). Selain itu pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Anwas, 2013: 87).

Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah yang terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin, karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Menurut Zubaedi, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang memengaruhi kehidupannya (Zubaedi, 2013: 5). Menurut Jim Ife, pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya (Zubaedi, 2013: 75).

Mengenai pelaku-pelaku di dalam pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Dalam pandangan Gunawan Sumodiningrat, pada setiap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun pihak yang peduli kepada masyarakat, upaya itu harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk

menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Selanjutnya berbagai upaya tersebut paling tidak harus memuat lima hal pokok. *Pertama*, bantuan dana sebagai modal usaha; *Kedua*, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat; *Ketiga*, penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat; *Keempat*, pelatihan bagi aparat dan masyarakat; *Kelima*, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat (Sumodiningrat, 1996: 5).

Salah satu pendekatan yang cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui upaya-upaya yang mendorong dan melibatkan masyarakat miskin bersama komponen masyarakat lainnya untuk bersinergi dan bekerjasama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kelembagaan masyarakat dalam rangka mewujudkan terbangunnya wadah organisasi masyarakat yang benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, agar mereka benar-benar terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Sehingga diharapkan mereka memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi dan sumber daya.

Organisasi masyarakat tingkat kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah organisasi yang didasarkan pada ciri-ciri sukarela, kesetaraan, kemitraan, inklusif, transparan, akuntabel, demokrasi kemandirian, otonomi, proaktif, semangat saling membantu, menghargai keragaman, dan kedamaian. Artinya, BKM merupakan organisasi masyarakat/institusi lokal yang dibentuk, dimiliki, dikelola, dan diperuntukan bagi pemenuhan kepentingan dan kebutuhan bersama masyarakat. Sehingga hakikat BKM lebih menampakkan wujud sebagai paguyuban atau perkumpulan seluruh masyarakat setempat (Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah, 2002: 30).

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) didirikan mempunyai tugas utama yaitu membantu menjalankan tugas pemerintah dalam persoalan kemiskinan masyarakat terutama dengan menumbuhkan kemandirian serta ekonomi lokal disaat terjadinya krisis multidimensi.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai penguatan organisasi masyarakat yang dimaksud, juga dititik beratkan pada upaya pengokohan peranannya sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan masyarakat sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri di lingkungan mereka, sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui upaya-upaya yang dapat mendorong dan melibatkan masyarakat miskin bersama komponen masyarakat lainnya untuk bersinergi dan bekerjasama (Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah, 2002: 5).

Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa sebagai salah satu usaha dalam menerapkan program-program pemerintah dengan bijak, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas memiliki program 3 (tiga) bidang dalam peran mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pinjaman untuk modal usaha atau membantu meringankan biaya kebutuhan rumah tangga saat dibutuhkan. Bidang-bidang tersebut diantaranya yaitu bidang ekonomi bergulir, bidang sosial bergulir, dan bidang lingkungan bergulir (Wawancara dengan ibu Siti Fatiah, anggota BKM Sokaraja Lor, pada tanggal 25 Juni 2019).

Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat terbantu dalam permodalan sehingga dapat mengembangkan usahanya. Selain

dari pada itu, program tersebut juga dilakukan sebagai usaha dalam pengembangan perekonomian sehingga diharapkan bisa terciptanya perbaikan kesejahteraan hidup pada masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

Diawali dengan kegiatan presentasi tentang potensi, masalah dan kegiatan BKM di tingkat Kabupaten Banyumas bersama dengan 10 Desa lainnya, BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan surat keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Nomor: 18/KPPS/DC/2009 Tentang Penetapan Kelurahan Desa Sebagai Lokasi Kegiatan PLP-BK (Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) dengan Stimulan BLM sebesar Rp. 1 Milyar. Karena prestasi dari keseluruhan BKM Mugi Rahayu Sokaraja Lor (Sokarajalornd.blogspot.com/?m=1 diakses pada tanggal 27 juni 2019).

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan PLP-BK BKM Mugi Rahayu Sokaraja Lor dan Pemerintah Desa Sokaraja Lor memberikan Bantuan Dana. Yang dimana Dana itu dialokasikan oleh Desa Sokara Lor untuk Pembangunan Gedung Sentra Bisnis Rakyat (GSBR) yang bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat (Wawancara dengan Ibu Nor Setiani, Anggota BKM Sokaraja Lor, pada tanggal 23 Oktober 2019).

Dari hasil pengamatan penulis terhadap BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dengan berbagai program yang dilakukannya, menjadikan penulis memilih BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor sebagai lokasi penelitian. Hal tersebut berdasarkan dari pengamatan program-program yang terdapat pada BKM tersebut. Selain itu, BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas adalah termasuk BKM yang memiliki predikat sebagai BKM yang lebih baik dibanding dengan BKM-BKM yang lainnya, sebagaimana hasil dari pengamatan yang dilakukan penulis.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”.

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi dengan judul upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya (Dalam <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019).

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah institusi lokal yang dilahirkan oleh P2KP. Idealnya, BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali masyarakat mandiri agar mampu mengatasi kemiskinan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan nama generik suatu lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan yang bertanggung jawab menjamin keterlibatan unsur masyarakat dalam keputusan kondusif untuk menumbuhkan keswadayaan masyarakat (Direktorat Jendral Perumahan Dan Permukiman Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, 2002: 4).

Adapun yang dimaksud dengan upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam penelitian ini adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses pemberian daya, kekuatan atau

kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 7).

Menurut Blanchard pemberdayaan adalah upaya untuk mengurangi belenggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan motivasinya. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat (Setiadi & Kolip, 2015: 809).

Menurut M. Payne pemberdayaan bertujuan untuk membantu orang memperoleh daya (kekuasaan) dalam mengambil keputusan dan tindakan terhadap hidup mereka dengan mengurangi efek hambatan sosial dan pribadi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri (Damsar & Indrayani, 2016: 241).

Masyarakat memiliki arti kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Soelaeman, 2009: 122).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Theresia, dkk, 2014: 93). Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti: menambah wawasan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat: penelitian ini dapat menjadikan gambaran dan menambah pengetahuan tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas serta upaya yang dilakukannya dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih paham dan bijak dalam memanfaatkan BKM itu sendiri.
- c. Bagi akademik: memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mendukung wacana keilmuan bagi perpustakaan kampus, serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan dan referensi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan penulis kemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Buku yang berjudul *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi* karya Prijono, S. Onny dan Pranaka, berpendapat bahwa pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal (Prijono, Onny dan Pranaka, 1996: 55).

Dalam buku yang berjudul *Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah* karya Abdul Basith menjelaskan bahwa keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif.

Buku yang berjudul *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* karya Sunyoto Usman, memaparkan sebagian dari refleksi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pernah berjalan dan menelaah dampaknya bagi kehidupan sosial.

Buku yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat* karya Ujianto Singgih Prayitmo, memaparkan *Pemberdayaan Masyarakat* merupakan sebuah konsep pembagunan yang mencerminkan paradigma baru yang tidak hanya bersifat ekonomis ataupun politis, tetapi merupakan pendekatan pembagunan yang berorientasi pada “*People-centered, participatory, empowering, and sustainable*”.

Penyusun juga melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Mengkaji hasil penelitian terdahulu adalah mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang telah ada dan belum ada (Arikunto, 2000: 75). Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang ada kaitannya terhadap penelitian yang akan dilakukan saat ini. Setelah menelaah beberapa penelitian, peneliti menemukan ada sejumlah karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Ida Royani dengan judul “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Sosial Di Kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi*”, membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Penanggulangan Sosial di kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya. Upaya yang dilakukan oleh BPMP untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam penelitian tersebut dilakukan melalui pembentukan kelompok dan pendampingan. Keberhasilan secara fisik program ini adalah tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat.

Skripsi karya Ayu Purnami Wulandari yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*”, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan pembuatan sapu gelagah di desa Kajongan sudah sesuai dengan tahap pemberdayaan. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan yaitu perencanaan, pendampingan, evaluasi dan tindak lanjut. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah yang meliputi identifikasi kebutuhan, latar belakang, tujuan, pembentukan struktur kepengurusan dan rekrutmen anggota warga belajar. Selanjutnya pendampingan dilakukan pada proses produksi dengan mempraktekkan dan memantau cara pembuatan sapu oleh pengelola, evaluasi dilakukan dengan menargetkan hasil produksi yang akan berpengaruh terhadap penghasilan warga belajar, kemudian tindak lanjut yang dilakukan pengelola yaitu menyiapkan ketrampilan lain dan diharapkan masyarakat bisa membuka usaha mandiri. Kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Kajongan dikatakan meningkat lebih dari 100%, dilihat dari pendapatan yang semula Rp.30.000/ hari menjadi Rp.100.000/ hari dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan kesehatan. Faktor pendorong yaitu antusias masyarakat, potensi alam sebagai bahan baku produksi dan dukungan dari pemerintah maupun lembaga lain, sedangkan faktor penghambat pemberdayaan melalui pelatihan pembuatan yaitu kurangnya permodalan, kurangnya fasilitas dalam kegiatan pelatihan, dan perubahan cuaca (Wulandari, 2014: vii).

Femy M. G. Tulusan dan Very Y. Londa dalam jurnalnya yang berjudul “*Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten*

Minahasa”, menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan di desa Lolah II kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yaitu kegiatan bantuan pinjaman modal usaha melalui program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan motivasi bekerja dan berusaha pelatihan serta pelatihan keterampilan usaha ekonomi. Akan tetapi dengan adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat seperti halnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang didominasi oleh tingkat konsumsi, gaya hidup, kondisi sosial budaya maupun tanggungan keluarga menjadikan peningkatan pendapatan berjalan lambat (Tulus dan Londa, 2014: 92).

Skripsi karya Itba' Muhammad Mahyana yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kelurahan Kalisuren Bogor*”, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terhadap BKM dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di kelurahan Kalisuren diwujudkan dalam pembentukan KSM. Peran masyarakat juga diwujudkan dalam pelaksanaan program antara lain dengan mengikuti pelatihan pembuatan tempe serta mengajukan usulan program perbaikan infrastruktur jalan, serta sanitasi pembuangan air. Proses partisipasi masyarakat adalah dengan menggalakkan pertemuan dan diskusi, mengidentifikasi masalah, menentukan skala prioritas, membentuk kepanitiaan, mengimplementasikan program, pelaporan, meningkatkan jalur komunikasi dan informasi, pengoptimalan kinerja pengurus, dan strukturisasi. Kondisi masyarakat cukup terbantu, salah satunya adalah bisa mengusulkan peminjaman modal untuk usaha.

Munawar Noor dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat”, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berbasis rakyat, menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Sehingga pemberdayaan

masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada (Noor, 2011).

Kurnia Wijayanti, dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Masyarakat”, menjelaskan bahwa kemampuan dari Pengurus BKM yang ada di kelurahan Tanjungrejo dalam upaya mengentaskan kemiskinan sudah cukup baik, banyak upaya telah dilakukan. Mereka bekerjasama dengan semua elemen masyarakat melalui media serta pertemuan rutin warga. BKM juga berupaya untuk memosisikan diri sebagai narasumber yang baik bagi masyarakat. Penyediaan modal yang diberikan oleh pemerintah melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) itu kemudian dikelola untuk penyediaan sarana prasarana yang memadai (Wijayanti, t.th: 35-40).

Anak Agung Istri Andriyani dalam jurnal “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)”, menjelaskan bahwa salah satu upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Penglipuran melalui tiga tahapan penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pemberian daya. Kegiatan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga budaya dan adat istiadat dengan adanya pariwisata harus terus- menerus dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat (Andriyani, 2017).

Mustangin, dkk dalam jurnal “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal melalui program Desa Wisata di Desa Bumiaji”, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatannya pertaniannya, melalui program wisata yang mendukung Desa Bumiaji merupakan desa yang memiliki kawasan pertanian dan sekaligus sebagai kawasan wisata berbasis alam yang mempengaruhi meningkatkan pendapatana masyarakat dan masyarakat bias berpartisipasi dalam rangka mensukseskan program desa wisata (Mustangin, 2017).

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ida Royani (2012)	<i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Sosial Di Kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi</i>	Upaya yang dilakukan oleh BPMP untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam penelitian tersebut dilakukan melalui pembentukan kelompok dan pendampingan. Keberhasilan secara fisik program ini adalah tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat.	Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah pada upaya yang dilakukan oleh BPMP untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan tempat penelitiannya di kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya BKM dalam pemberdayaan masyarakat dan tempat penelitiannya di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.
2.	Ayu Purnami Wulandari (2014)	<i>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa</i>	Kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Kajongan dikatakan meningkat lebih dari 100 %, dilihat dari pendapatan yang semula Rp.30.000/hari menjadi	Pada penelitian terdahulu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan sapu gelagah dan tempat

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		<i>Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga</i>	Rp.100.000/ hari dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan kesehatan. Faktor pendorong yaitu antusias masyarakat, potensi alam sebagai bahan baku produksi dan dukungan dari pemerintah maupun lembaga lain, sedangkan faktor penghambat pemberdayaan melalui Pelatihan pembuatan yaitu kurangnya permodalan, kurangnya fasilitas dalam kegiatan pelatihan, dan perubahan cuaca.	penelitian di desa Kajongan kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga, sedangkan pada penelitian ini pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui BKM dan tempat penelitiannya di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.
3.	Femy M. G. Tulus dan Very Y. Londa (2014)	<i>Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa</i>	Program pemberdayaannya yaitu kegiatan bantuan pinjaman modal usaha melalui program nasional pemberdayaan masyarakat, pengembangan motivasi bekerja dan berusaha, serta pelatihan keterampilan usaha ekonomi. Akan tetapi dengan adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat seperti halnya dalam	Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada peningkatan pendapatan dan tempat penelitiannya di desa Lolah II kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya BKM dalam pemberdayaan masyarakat dan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>memenuhi kebutuhan hidup yang didominasi oleh tingkat konsumsi, gaya hidup, kondisi sosial budaya maupun tanggungan keluarga menjadikan peningkatan pendapatan berjalan lambat.</p>	<p>tempat penelitiannya di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.</p>
4.	Itba' Muhammad Mahyana (2010)	<p><i>Partisipasi Masyarakat Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kelurahan Kalisuren Bogor</i></p>	<p>Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam pembentukan KSM. Peran masyarakat juga diwujudkan dalam pelaksanaan program antara lain dengan mengikuti pelatihan pembuatan tempe serta mengajukan usulan program perbaikan infrastruktur jalan, serta sanitasi pembuangan air. Kondisi masyarakat cukup terbantu, salah satunya adalah bisa mengusulkan peminjaman modal untuk usaha.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah pada partisipasi masyarakat terhadap BKM dan tempat penelitiannya di kelurahan Kalisuren Bogor, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya BKM dalam pemberdayaan masyarakat dan tempat penelitiannya di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.</p>

Sumber: Data sekunder diolah

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis membagi ke dalam 3 (tiga) bagian pokok yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, yang akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian awal skripsi memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab secara spesifik yang akan memaparkan mengenai inti dari penelitian, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), teori pemberdayaan masyarakat, dan teori tentang upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terhadap pemberdayaan masyarakat.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian serta pembahasan penelitian yakni upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup, yang mencakup kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

Pada bagian akhir dari skripsi ini berisi mengenai hal-hal yang terkait dengan penyusunan skripsi yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

1. Pengertian BKM

Soetomo (2010: 38) menjelaskan bahwa BKM sebagai “institusi lokal yang dibentuk melalui program PNPM didesain sebagai institusi sukarela”. Kusumo Wijayanti menyatakan bahwa “BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat bagi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan di komunitasnya” (Wijayanti, 2009: 38). BKM adalah lembaga masyarakat (*Civil Society Organization*), yang pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*), yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (*value based*) tata cara pembentukan Unit Pengelola (UP).

BKM sebagai institusi lokal yang dibentuk melalui program PNPM didesain sebagai institusi sukarela. Dengan demikian, proses dan pembentukannya tidak banyak campur tangan pemerintah. Dibanding dengan program pemerintah yang lain, program ini lebih kental dengan nuansa pendekatan (Soetomo, 2011: 172).

2. Tujuan BKM

BKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagai motor penggerak penumbuhan kembali *capital social* seperti solidaritas, kesatuan, gotong royong dan sebagainya. Dalam buku pedoman teknis tinjauan partisipatif, PNPM perkotaan (2007), BKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagai motor penggerak penumbuhan kembali *capital social* seperti antara lain solidaritas, kesatuan, gotong royong dan sebagainya. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan peran tersebut, BKM mengorganisasikan warga untuk merumuskan program jangka menengah 3

(tiga) tahun dan rencana tahunan penanggulangan kemiskinan. (Wijayanti, 2011: 38). BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah desa/kelurahan dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan serta aturan demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis dan pronangkis.
- c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil.
- d. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh UP-UP.
- e. Mengawasi terlembaganya nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan.
- f. Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- g. Membangun kerjasama dengan pihak luar (Departemen Pekerjaan Umum).

3. Peran dan Fungsi BKM

Menurut Soetomo, fungsi BKM ada dua:

- a. Fungsi ke dalam yaitu sebagai media partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- b. Fungsi ke luar yaitu sebagai representasi masyarakat lokal dalam menjalin hubungan kerjasama dengan para *stakeholder* (Wijayanti, 2012: 38-39).

4. Proses Pembentukan BKM

BKM beranggotakan warga komunitas yaitu diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), tokoh masyarakat atau tokoh agama, unsur aparaturnya daerah misalnya LKMD, dapat berpartisipasi

dalam BKM dalam kapasitas pribadi. Pimpinan BKM harus dipilih dari dan oleh anggotanya (Wijayanti, 2012: 39).

5. Unit-unit Pelaksana Tugas BKM

Unit-unit pengelola ini diangkat dan diberhentikan oleh BKM melalui mekanisme rapat anggota BKM. Dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitasnya, tiap tahun unit-unit pengelola wajib mempertanggung-jawabkan semua kerja mereka kepada BKM di dalam rapat anggota tahunan BKM.

Unit-unit pengelola BKM antara lain:

a. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM, P2KP, maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah.

b. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola Lingkungan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman diwilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman, tata kelola yang baik (*good governance*) di bidang pemukiman, dan lain-lain.

c. Unit Pengelola Sosial (UPS)

Unit Pengelola Sosial adalah salah satu gugus yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan

nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D).

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari UPK, UPL, dan UPS merupakan unit mandiri dan dapat mengambil keputusan yang bersifat operasional selama tidak bertentangan dengan keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh BKM. Oleh sebab itu setiap unit pengelola wajib mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya kepada BKM (Tata Cara Pembentukan Unit Pengelola (UP) BKM P2KP: 1-2).

6. Tugas dan Fungsi UPK, UPL dan UPS

Secara umum tugas dan fungsi unit-unit pengelola BKM adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BKM, sehingga potensi unit-unit pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang berkaitan dengan masing-masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam PJM Projangkis. Secara rinci tugas masing-masing unit pengelola dijabarkan sebagai berikut:

a. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM;
- 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi;
- 3) Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan; dan
- 4) Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK.

b. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

UPL berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang lingkungan perumahan dan permukiman dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;

- 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia Pembangunan;
- 3) Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan pemukiman yang lestari, sehat dan terpadu;
- 4) Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya;
- 5) Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPL.

c. Unit Pengelola Sosial (UPS)

UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;
- 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial;
- 3) Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/infokom;
- 4) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D);
- 5) Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santuan, beasiswa, sunatan massal, dll; dan
- 6) Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPS (Tata Cara Pembentukan Unit Pengelola (UP) BKM P2KP :3-4).

7. Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Dalam penanggulangan kemiskinan, visi yang menjadi pemersatu. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berorientasi pada penanggulangan kemiskinan sehingga harus dipastikan warga miskin terdaftar dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima manfaat primer sebagai kelompok sasaran dari program-program yang sudah dikembangkan dalam PJM Projangkis. Manfaat yang dapat dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, permukiman dan lainnya.

Posisi KSM adalah independen, artinya KSM bukan bawahan BKM/LKM atau Unit Pengelola (UP). Hubungan KSM dan BKM/LKM dan UP merupakan hubungan kemitraan, karena itu pengembangan KSM tidak boleh berorientasi semata-mata mengakses dana yang ada di BKM/LKM, KSM harus mengembangkan kegiatan mandiri atau mengembangkan akses sumber daya sendiri. Semua ini dilakukan agar KSM dapat menjadi kelompok pemberdaya baik bagi anggota KSM maupun masyarakat umum.

a. Prinsip-prinsip KSM

- 1) Saling mempercayai dan saling mendukung.
- 2) Bebas dalam membuat keputusan.
- 3) Bebas dalam menetapkan kebutuhan.
- 4) Berpartisipasi nyata.

b. Peran dan Fungsi KSM

- 1) Sebagai sarana proses perubahan sosial.
- 2) Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah.
- 3) Sebagai wadah aspirasi.
- 4) Sebagai wadah menggalang tumbuhnya saling kepercayaan.
- 5) Sebagai sumber ekonomi.

c. KSM Mandiri

Faktor-faktor yang menjadikan KSM Mandiri antara lain:

- 1) Pembentukan KSM didasari dengan sukarela. Artinya, bahwa anggota yang bergabung dalam kelompok tidak didasari dengan niat hanya ingin mengajukan bantuan pinjaman modal melainkan niat bergabung dalam KSM atas dasar kebutuhan untuk membangun kerjasama.
- 2) KSM memiliki rencana kegiatan yang jelas berdasarkan visi yang telah disepakati bersama.
- 3) KSM mempunyai jadwal pertemuan rutin dalam rangka membahas persoalan-persoalan yang terjadi di antara anggotanya serta membahas hal yang dianggap penting bagi anggota KSM, misalnya penguatan pengetahuan mengenai kesehatan, pendidikan, dll.
- 4) Kelompok memiliki kesepakatan bersama tentang kepemilikan fasilitas yang diterima, kontribusi yang diberikan kepada kelompok, membangun tata aturan hak dan kewajiban dalam kelompok.
- 5) Kemampuan kepemimpinan/kepengurusan kelompok, memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan kelompok serta berjalannya mekanisme pemilihan pengurus.
- 6) KSM bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan yang dilakukan baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan.
- 7) Adanya dana swadaya, kelancaran simpanan dan pengakaran kelompok terkait dengan kepemilikan kelompok.
- 8) KSM mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan anggota dan kelompoknya.
- 9) KSM mampu membangun jejaring dengan kelompok lain (Kementerian Pekerjaan Umum: 44-46).

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ambar Teguh S mengungkapkan arti pemberdayaan sebagai berikut, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga, upaya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “*empowerment*”. Menurut

Mernam Webster dan Oxford English Dictionary (Adisasmito, 2015: 151) kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberikan kemampuan. Dalam pengertian kedua kata tersebut, pemberdayaan diartikan memberi kemampuan atau keberdayaan kepada pihak lain yang tidak berdaya.

Kata *empowerment* berasal dari kata dasar *empower* yang berarti *to invest with power, especially legal power or official authority* atau *to equip or supply with an ability*. Jadi pemberdayaan diartikan menguasai, memberikan kuasa atau memberi wewenang sehingga menjadi obyek yang berkuasa. Dalam pemberdayaan terjadi proses yang mendorong dan meyakinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kemampuan dan kreativitas (Widanti, 2011: 44).

Hulme dan Turner berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional (Adisasmito, 2014: 152).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dirangkum bahwa pemberdayaan adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kreativitas, kekuatan untuk mendorong suatu proses perubahan sosial kepada masyarakat yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh terhadap arena politik.

Pemberdayaan adalah “sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instansi. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) tahap yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan” (Wrihatolono Dan Dwijowojoto, 2007: 2). Pemberdayaan pada akhirnya bukanlah sekedar teori sebagaimana dikatakan Ron Johnson dan David Redmod (*the art of empowerment*) bahwa *at last, empowerment is about art. It is about value we believe*. Tatkala pemberdayaan menjadi salah satu praktek dan seni,

yang mengemukakan adalah bagaimana memanajementi proses pemberdayaan, artinya “memberdayakan tidak boleh bermakna merobatkan atau menyeragamkan”. Pemberdayaan juga memberikan ruang pada pengembangan keberagaman kemampuan manusia yang beragam, dengan asumsi satu sama lain akan melengkapi. Pemberdayaan merupakan proses alamiah (Wrihatolono Dan Dwijowojoto, 2007: 2).

Pemberdayaan merupakan konsep kehidupan proses alamiah, kehidupan itu perlu dan harus dimanajementi. Konsep manajemen berbeda dengan rekayasa karena manajemen lebih fokus pada meningkatkan nilai tambah suatu aset. Jadi pemberdayaan bukanlah semata-mata konsep politik melainkan pada konsep suatu manajemen dan pada akhirnya pemberdayaan akan mempunyai indikator akan keberhasilan (Wrihatolono Dan Dwijowojoto, 2007: 9).

Community dalam bahasa Yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari kata tersebut, Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan untuk menentukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan adalah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah tertentu yang memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang (Desiati, 2001: 254). Sehingga tercipta kerjasama antar masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkup kehidupan bersama untuk melakukan pembangunan yang terarah. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. Masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Dalam pengertian lain menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat (Anwas, 2013: 3).

Menurut Psoinos dan Smithson “pemberdayaan adalah sebuah persepsi dan keyakinan, sebuah posisi yang dimiliki oleh peneliti yang mengambil perspektif pengalaman pada arti pemberdayaan” (Greasley, 2004: 354-368). Pemberdayaan merupakan sebuah pengalaman peneliti yang diyakini dapat memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat yang lemah dalam masyarakat untuk menimbulkan rasa percaya diri dan pengalaman masyarakat dalam mengatasi permasalahan.

Begitu juga Suparjan dan Hempri Suyatno (2003: 44) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah batasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat (*community awareness*). Diharapkan dengan adanya kesadaran komunitas ini dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta mengeliminir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan (Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, 88).

Menurut Kartasmita pemberdayaan masyarakat adalah “upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam

kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan” (Martono Dan Muhammad, 2017: 2). Salah satu upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut adalah dengan jalan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut juga disebutkan oleh Widayanti mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan, yang dilaksanakan berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil. Aksi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya (Mustangin, t.th: 59-72). Aksi pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Mustangin, t.th: 88).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memandirikan masyarakat dengan memberikan kemampuan, keterampilan dan kreatifitas dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Kebebasan yang dimaksud bisa diciptakan kelompok itu sendiri atau melalui fasilitasi pemerintah; (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, dan sustainable*” (Suharto, 2009: 57). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata mempengaruhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap pertumbuhan-pertumbuhan di masa lalu.

Terdapat dalam kerangka pikiran bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta memampukan dan memandirikan masyarakat, maka upaya pemberdayaan masyarakat haruslah dinilai dengan menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah untuk membentuk daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. Selanjutnya upaya ini harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Perbuatan ini meliputi langkah nyata dan menyangkut persediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat makin berdaya (Kartasmita, 1996: 145).

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik jembatan, maupun sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Penulis

berpandangan bahwa perlindungan dan pemeliharaan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah (Kartasasmita, 1996: 145).

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek dapat diketengahkan sebagai berikut: (Purwanto, 2007).

- a. Peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Dalam rangka ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan:
 - 1) Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
 - 2) Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
 - 3) Untuk itu, maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian.
 - 4) Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
 - 5) Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.

6) Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Untuk dapat menjalankan misinya, maka birokrasi harus ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, dan ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hirarkis seperti aparat desa dan kecamatan, maupun fungsional seperti PPL, guru, dokter, dan bidan.

- b. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri.
- c. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi formal, seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, Pokdarwis atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata muncul tanpa tujuan. Pemberdayaan erat kaitannya dengan pembangunan, dan pembangunan merujuk pada tujuan dan perbaikan. Tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan (Trisnani, 2014: 15). Tujuan

utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan untuk berpikir, memutuskan suatu hal yang dipandang tepat demi pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan atau daya yang dimiliki. Pada intinya kemandirian dalam hal berpikir, bertindak dan pengendalian diri.

Selain itu, tujuan pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan baik karena kondisi internal (misalkan persepsi mereka sendiri), maupun kondisi eksternal (misalkan ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Tujuan pemberdayaan dapat dipahami sebagai terwujudnya perkembangan usaha yang dijalankan untuk bisa hidup mandiri serta tercukupi kebutuhan hidupnya dengan jalan memberikan berbagai dorongan usaha yang berbentuk modal usaha beserta kegiatan bagi anggota masyarakat (Suharto, 2017: 60).

Menurut World Bank, pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat kepada kelompok (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya (Theresia, 2014: 117). Pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kesempatan membentuk individu maupun kelompok menjadi lebih berdaya, mandiri dan berani melalui proses belajar sehingga terjadi perbaikan keadaan.

Pemberdayaan sendiri menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah, yang bertujuan untuk: (Theresia, 2014: 116).

- a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;

- b. Berpartisipasi dalam proses pemberdayaan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: (Theresia, 2014: 119).

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Pemberdayaan bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai pemberian (*charity*).

Menurut catatan Ife dalam bukunya Miftachul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung. "*Empowerment aims to increase the power of the disadvantaged,*" tulis Ife. Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni:

- a. Kekuasaan (*Power*): Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.
- b. Kekurang beruntungan (*Disadvantaged*): Lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktorstruktural, kultural dan personal (Huda, 2009: 272-273).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hakikat pemberdayaan ialah mendorong kekuatan masyarakat untuk membuka akses yang seluasluasnya agar tidak terjadi monopoli dan dominasi kekuasaan, sehingga kelompok masyarakat mampu memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan, secara sederhana digambarkan sebagai berikut:

Tahap *pertama* adalah penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diperdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, misalnya target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *Belief*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka mampu

membangun mimpi, diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari luar diri mereka).

Tahap *kedua* adalah pengkapasitasan, inilah yang sering kita sebut “*capacity bulding*” atau dalam bahasa yang sederhana memampukan atau *enabling*. untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomikan diberikan program kemampuan untuk membuat mereka cakap dalam mengelola otonomi yang diberikan (Wrihatnolo Dan Dwidjowijoto, t.th: 4). Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturasi mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik dan benar karena masalah tidak memadainya kecakapan daerah dalam melakukan otonomi daerah. Biaya otonomi daerah biasanya sangat mahal karena pengkapasitasan pasca pemberian otonomi bertemu dengan resistensi dan ketegangan yang seharusnya tidak terjadi.

Tahap *ketiga* adalah cukup sederhana, namun kita tidak cakap dalam menjalankannya karena mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran (Wrihatnolo Dan Dwidjowijoto, t.th: 7). Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuatu dengan kecakapan penerima. Pemberian kredit pada suatu kelompok miskin yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan usaha.

Menurut Tim Delivery menyatakan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap 1: Seleksi lokasi. Seleksi lokasi/ wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat.

- b. Tahap 2: Sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.
- c. Tahap 3: Proses pemberdayaan masyarakat. Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut, masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:
 - 1) Kajian keadaan pedesaan partisipatif.
 - 2) Pengembangan kelompok.
 - 3) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Monitoring dan evaluasi partisipatif
- d. Tahap 4: Pemandirian masyarakat. Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Strategi pemberdayaan dapat dibagi menjadi dalam tiga kelompok, yaitu: *pertama*, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan solusi tercapainya suasana mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. *Kedua*, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. *Ketiga*, kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat melalui upaya khusus (Sumodinigrat, 1999: 134). Menurut Musa Asy'ari, program pembinaan berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: (Asy'arie, 1997: 141-144).

a. Pelatihan Wirausaha

Melalui pelatihan ini, setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk

memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta, di samping diharapkan peserta memiliki pengetahuan teoritis tentang penguasaan kewirausahaan.

b. Pemagangan

Pemagangan di sini adalah pengenalan terhadap usaha yang akan digeluti kelak. Pemagangan ini sangat perlu, karena suasana dan realitas usaha memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan di luar usaha. Tanpa pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik, akan menyulitkan bagi seseorang yang akan memulai usahanya.

c. Penyusunan proposal

Memulai penyusunan proposal memungkinkan untuk membuka jalinan kerja sama dengan berbagai lembaga perekonomian.

d. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang, merupakan salah satu faktor penting dalam usaha, tetapi bukan yang utama. Untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, perlu mengadakan hubungan kerja sama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal tetapi untuk pengembangan setelah usaha itu sudah dirintis dan menunjukkan prospek yang cukup baik.

e. Pendampingan

Pendampingan ini berfungsi sebagai pengarah sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar dikuasai.

f. Jaringan Bisnis

Dengan melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, maka untuk melahirkan wirausaha sejati, tinggal menunggu waktu. Proses selanjutnya perlu dibentuk *net-*

working bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar (Asy'arie, 1997: 141-144).

Berdasarkan uraian tahapan di atas, dalam mencapai peningkatan ekonomi masyarakat perlu adanya langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu: (1) Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi; (2) Melakukan program pembinaan yang secara terus menerus terhadap pelaku-pelaku tersebut mulai dengan pendampingan; (3) Melakukan program-program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha; (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik antar instansi yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi maupun penerapan teknologi.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Ndraha, diperlukan berbagai program pemberdayaan (Ndraha, 2003: 132), di antaranya:

- a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar yang diperintah terhadap pemerintah. *Bargaining* ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Utomo menyatakan bahwa birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki kualitas kehidupan kerja yang tinggi dan berorientasi kepada: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*); (2) program pengembangan karir (*career development program*); (3) gaya kepemimpinan (*leadership style*); (4) derajat tekanan yang dialami oleh karyawan (*the degrees of stress experienced by employees*); dan (5) budaya organisasi (*the culture of the organisation*).
- b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi

sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.

- c. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan (Hutomo, 2000: 7-10), yaitu:

- a. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang perlu dicermati, yaitu: *Pertama*, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha, tetapi juga masyarakat yang tidak mempunyai faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bergantung pada gaji. Dalam pemberdayaan aspek ini, nampaknya pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama. *Kedua*, perlunya mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek permodalan ini, adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru melalui usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga

keuangan; dan (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian sub sistem.

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktifitasnya.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

d. Kelembagaan

Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan seperti: permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya.

Keempat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat yang pada awalnya belum berdaya menjadi berdaya, dan mandiri.

5. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan pada umumnya dilandasi pada upaya mengoptimalkan proses kegiatan, proses adalah seluruh kegiatan/langkah secara bertahap yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu (Ardiyanto, 2016: 14), yang terdiri dari:

- a. Pendekatan *capacity building* untuk memberdayakan kelembagaan agen pembaharu.

- b. Pendekatan *new public managemen (NPM)* untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal.
- c. Pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi agen pembaharu.
- d. Pendekatan substansial melalui pengorganisasian *knowledge, attitude, practice* (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek dan substansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

Pelaksanaan proses dan strategi pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Edi, 2017: 67).

a. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Proses pemberdayaan masyarakat mendasarkan pada empat prinsip, (Ardiyanto, 2016: 17). yaitu:

a. Partisipasif

Proses pemberdayaan harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan semua *stakeholder* baik pemerintah, swasta, masyarakat, termasuk masyarakat miskin itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek namun subjek dalam perencanaan pemerdayaan.

Menurut Diana Conyer, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat dilihat sebagai suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat.
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program jika merasa dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan karena mereka akan lebih mengetahui dan mempunyai rasa memiliki program tersebut.
- 3) Munculnya anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Sedangkan menurut Damar, faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi adalah faktor status sosial ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan (Damsar, 2016: 239).

b. Transparansi

Adanya keterbukaan diantara *stakeholder* sehingga setiap tahapan akan direncanakan, mulai dilaksanakan sampai dengan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Akuntabilitas

Perencanaan pemberdayaan nantinya dapat diimplementasikan dan tercapai tujuan serta sasarnya.

d. Manfaat Bersama

Proses pemberdayaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada upaya pembangunan masyarakat sebagai kontribusi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Menurut Ambar Teguh tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka berupa wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Wulandari, 2014: 16).

6. Model Pemberdayaan Masyarakat

Model pemberdayaan tidak selamanya sama satu dengan yang lain. Dalam menganalisis model pemberdayaan harus memperhatikan permasalahan atau kebutuhan masyarakat, lokasi pemberdayaan serta kearifan lokal yang ada di daerah. Salah satu model pemberdayaan yang dikembangkan berbasis potensi lokal oleh Astuti meliputi beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut: (a) tahap persiapan atau tahap *look and think*, (b) tahap *act*, dan (c) monitoring dan evaluasi (Widiastuti, 2015: 44).

Tahap pertama atau tahap *look and think* meliputi persiapan secara administratif maupun persiapan lapangan penelitian. Secara administratif untuk mengetahui model yang cocok digunakan dalam lokasi penelitian dibutuhkan langkah awal penelitian meliputi rancangan serta tahapan penelitian, perijinan serta kontak awal dengan berbagai pihak yang terkait dalam penelitian. Untuk persiapan lokasi dibutuhkan *assesment* atau dugaan awal untuk memetakan kondisi subyek penelitian dan *Stakeholder* yang terlibat, kemudian dilakukan analisis kebutuhan potensi dan sistem sumber yang tersedia di lokasi penelitian.

Dari beberapa kegiatan tersebut akan diperoleh data subyek penelitian, serta dilakukan diskusi mengenai masalah, kebutuhan, dan rencana aksi yang akan dilakukan. Untuk memastikan kondisi sasaran penelitian dilakukan *home visit* untuk triangulasi dengan kondisi lapangan sehingga memperoleh informasi adanya sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan.

Setelah tahap *look and think* yaitu melakukan bimbingan dan pendampingan. Bimbingan bisa berupa bimbingan usaha, bimbingan keterampilan dan pendampingan sosial oleh tim pendamping lokal dan proses sinkronisasi program antar instansi untuk mendukung percepatan ekonomi, melalui pengembangan teknologi agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran. Kemudian tahap akhir masuk dalam evaluasi dan monitoring yang berupa diskusi kelompok di tingkat local (Widiastuti, 2015: 44).

Selain itu, menurut D. Geroy, ada beberapa strategi model pemberdayaan, diantaranya: (1) pembinaan atau mentoring, (2) modeling, dan (3) karir.

a. Pembinaan atau Mentoring

Pembinaan atau mentoring merupakan suatu proses yang direncanakan secara informal untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola potensi dengan mandiri. Tujuan adanya pembinaan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan mengubah perilaku atau

kebiasaan tidak baik dalam masyarakat dengan hal yang lebih efektif dengan pembelajaran.

Dalam hal ini, Pembina harus memiliki jiwa kepedulian terhadap masyarakat dan menjunjung tinggi martabat dan saling menghargai. Pembinaan akan dapat berjalan dengan efektif, jika seorang pembina dapat memutus hirarki dan batas fungsional dalam masyarakat. Seperti halnya atasan dengan bawahan, sehingga masyarakat akan lebih adaptif terhadap perubahan.

b. Modeling

Pemodelan perilaku merupakan studi tentang keunggulan pribadi kecenderungan meniru orang-orang yang dikagumi dan hormati. Pemodelan merupakan pelatihan berbasis keterampilan. Pemodelan biasanya menggunakan diskusi, demonstrasi, *role playing*, dan keterampilan yang dapat diajarkan. Pemodelan merupakan cara efektif untuk mengembangkan keterampilan dan mengubah perilaku individu. Pemodelan dapat dilakukan dengan menetapkan standar yang tinggi, memberikan contoh, menjelaskan nilai-nilai yang jelas dengan memberi contoh perilaku sesuai aturan, pada akhirnya akan membangun komitmen yang merupakan proses dari pemberdayaan.

c. Karir

Perencanaan perkembangan masyarakat untuk masa mendatang harus dipersiapkan sedini mungkin karena tuntutan zaman yang mengharuskan fleksibel dan memiliki beberapa keterampilan. Untuk itu, salah satu tahap penting dalam pemberdayaan adalah perekrutan. Seleksi yang tepat, penempatan dan pengasuhan didefinisikan sebagai jalur karir yang akan dikembangkan. Dalam pengembangan karir dibutuhkan pengakuan prestasi, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan menumbuhkan rasa komitmen supaya dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan yang diinginkan (Geroy, 1998: 57-65).

7. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan beberapa strategi pemberdayaan, yaitu:

- a. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat,
- b. Mengembangkan kapasitas masyarakat,
- c. Mengembangkan sistem perlindungan sosial,
- d. Mengurangi berbagai bentuk pengaturan dalam masyarakat,
- e. Membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat, dan
- f. Mengembangkan potensi masyarakat (Adisasmito, 2014: 155-156).

Salah satu langkah awal dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat adalah dengan mendukung posisi tawar dan akses masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan input sumberdaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat. Langkah kedua yang diambil setelah penguatan lembaga dan organisasi masyarakat adalah dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi, sehingga dapat memperluas kerjasama dan mendirikan pendapatan yang layak, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu dan masyarakat miskin.

Langkah ketiga setelah pengembangan kapasitas masyarakat adalah dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti halnya masyarakat yang terkena musibah bencana alam dan masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi. Selanjutnya dengan mengurangi berbagai bentuk pengaturan yang menghambat masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapat, melakukan interaksi sosial untuk membangun kesepakatan antara kelompok masyarakat dengan organisasi sosial politik.

Setelah itu, dengan membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui pengembangan forum lintas yang dibangun dan

dimiliki masyarakat setempat. Terakhir, dengan mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat di tingkat lokal untuk memperkuat solidaritas masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan dan khususnya membantu masyarakat miskin dan rentan sosial. Dengan demikian diharapkan mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang, mandiri, dengan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

C. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pada hakikatnya pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan Negara yang lain.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatannya yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan (Tjokroamidjojo, 1995: 189).

Sedangkan menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Fakhri mendefinisikan pembangunan yang dikaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau perubahan masyarakat dari tradisional kemodern. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, gerak menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih. Menurut Siagian pembangunan adalah Suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 2007: 2).

Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk ke dalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan pembangunan, terutama bukan karena orang tidak faham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit.

Menurut Soetomo, pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural atautkah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga *stake holders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional.

Adapun pendapat lain tentang pembangunan dikemukakan oleh Rogers, yakni sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara

yang sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

2. Ciri-ciri Pembangunan

Pada dasarnya, ciri-ciri pembangunan itu dapat dilihat dari pengertian pembangunan itu sendiri. Ciri-ciri pembangunan yang dikemukakan disini adalah berdasarkan tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan yang diberikan oleh Sondang P. Siagian (siagian, 2014: 79-80), yaitu:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap- tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi

yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.

- e. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

3. Administrasi Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula ke arah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut Nation-building (Siagian, 2001: 4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Apabila definisi di atas dimaknai secara cermat, akan muncul dipermukaan paling sedikit tujuh ide pokok. *Pertama*: pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat indenpenden akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). Banyak cara yang dibutuhkan dalam pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. *Kedua*: pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu tang akan dilaksanakan. *Ketiga* pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan bararti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa mendatang.

Keempat rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain. *Kelima* pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara fikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. *Keenam* modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketujuh semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya. Dalam proses

pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dari masing-masing negara tersebut, banyak diantaranya negara-negara yang sedang berkembang tersebut berhasil merealisasikan tujuan nasionalnya. Akan tetapi banyak pula yang mengalami kegoncangan-kegoncangan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Menurut Syamsi (Subri, 2003: 15) Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifatnya dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya.

Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan pasar. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung misalnya pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa peningkatan kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan

terlihat setelah murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik. (Wibawa, 2009: 7).

4. Sasaran Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sasaran umum yang diharapkan dapat dicapai adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya pertanian (*agricultural resource based*) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran khusus sebagai berikut:

- a. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar seluruh wilayah.
- b. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisien yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Tercapainya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi (Adisasmita, 2016: 23-24).
- d. Konsep Perencanaan Pembangunan dari bawah (*Bottom Up Planning*). Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari keterlibatan peran serta Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi harus dipandang pula sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan pedesaan harus diletakkan dalam konteks: (1) sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan

prasarana dan sarana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) sebagai upaya mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan kokoh. Rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. Karena dana atau anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembanguann yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan: (1) penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan proritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur, dan (2) didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut *bottom up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) secara nyata dan terarah.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerah tersebut.

Bentuk partisipasi masyarakat tersebut antara lain, mereka bersedia menyerahkan sebagai lahan/tanahnya yang dilewati oleh pembangunan jalan desa atau jaringan irigasi, tanpa meminta pembayaran ganti rugi harga lahan/tanah tersebut, kerja bersama-sama dalam pembangunan jalan desa (tanpa diberikan upah), dan lainnya (Adisasmita, 2016: 25).

D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Seperti dijelaskan bahwa pemberdayaan menurut Moh. Ali Aziz, dkk. adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara

substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain (Aziz, 2005: 169).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional (Wrihatnolo, 2007: 75).

Sunyoto Usman dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian (Huraerah, 2008: 87).

Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki. Dalam pandangan Kartasmita dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat mengatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan menurut Islam, lebih lanjut dikatakan oleh Amrullah Ahmad dalam Pengembangan Masyarakat Islam adalah sebuah

sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam (Machendrawati, 2001: 29).

Secara tegas Al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang penempatan dakwah pemberdayaan masyarakat dalam kerangka-kerangka peran dan proses dalam Surat Al-Ahzab ayat 45-46 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “*Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah SWT dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi*”. (Q.S. Al-Ahzab: 45-46).

Kedua ayat di atas mengisyaratkan sekurang-kurangnya lima peran dakwah: *Pertama*, dakwah berperan sebagai *syahidan*, yaitu saksi atau bukti ketinggian dan kebenaran ajaran Islam, khususnya melalui keteladanan yang diperankan oleh pemeluknya. *Kedua*, dakwah berperan sebagai *mubasyiran*, adalah fasilitas pengembira bagi mereka yang meyakini kebenarannya. Kita dapat saling memberi kabar gembira sekaligus saling memberikan inspirasi dan solusi dalam menghadapi berbagai masalah hidup. *Ketiga*, dakwah berperan sebagai *nadziran*, sejalan dengan perannya sebagai pemberi kabar gembira, dakwah juga berperan sebagai pemberi peringatan. Ia senantiasa berusaha mengingatkan para pengikut Islam untuk tetap konsisten dalam kebajikan dan keadilan sehingga tidak mudah terjebak dalam kesesatan.

Keempat, dakwah sebagai *daa'iyah ila Allah*, adalah panglima dalam memelihara keutuhan umat sekaligus membina kualitas umat sesuai dengan idealisasi peradaban yang dikehendakinya. Proses rekayasa sosial berlangsung dalam keteladanan kepribadian, sehingga ia senantiasa berlangsung dalam proses yang bersahaja, tidak berlebihan, dan kukuh dalam memegang prinsip pesan dakwah, yakni selalu mengisyaratkan panggilan spiritual untuk tetap menjadi manusia. *Kelima*, dakwah berperan sebagai *siraajan munira*, sebagai akumulasi dari peran sebelumnya, dakwah memiliki peran sebagai pemberi cahaya yang menerangi kegelapan sosial atau

kegelapan spiritual. Ia menjadi penyejuk ketika umat menghadapi berbagai problema yang tidak pernah berhenti melilit kehidupan manusia (Muhtadi dan Safe'i, 2003: 17-18).

Menurut Paul A. Samuelson dalam Monzer Kahf, ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi (Kahf, 1995: 2). M.A. Manan dikutip oleh Bustanuddin Agus dalam Islam dan Ekonomi, mengatakan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami nilai-nilai Islam (Agus, 2006: 41). Abdullah Al-'Arabi mendefinisikan ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi (Agus, 2006: 41-42).

Dari kutipan definisi yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan pemecahan masalah ekonomi dengan menjadikan prinsip dasar syari'ah Islam sebagai kerangkanya. Di sisi lain tidak menutup diri terhadap segala perubahan-perubahan, walau dari ekonom non-muslim sekalipun (Agus, 2006: 42).

Ekonomi Islam adalah sebuah kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syari'at Islam. Definisi tersebut menekankan pada nilai-nilai Islami dan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial (*hablun min-annas*). Definisi ini memberikan implikasi bahwa ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial Islam yang tidak terpisah dari nilai-nilai Islam lainnya (*hablun min Allah*). Pada definisi ini dengan jelas disebutkan bahwa ekonomi Islam harus bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan demikian, bangunan ekonomi tidak terpisah dari ajaran Islam yang integral (*mutakamil*).

Definisi ini juga mengandung suatu koreksian terhadap definisi ilmu ekonomi yang memisahkan antara kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai moral.

Penafsiran masalah ekonomi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam secara integral, misalnya apabila kita ingin mengetahui pandangan Islam terhadap politik ekonomi atau kajian filsafat sejarah materi, maka semua masalah tersebut harus dikaji berdasarkan aliran yang dianut oleh Islam, karena bagaimanapun juga setiap kebudayaan mempunyai konsep terhadap alam. Konsep yang dimiliki oleh suatu kebudayaanlah yang akan menentukan cara berpikir dan bekerjanya, atau seperti yang dikatakan oleh Umar Chapra bahwa setiap masyarakat atau sistem ekonomi pasti didominasi oleh pandangan dunianya sendiri yang didasarkan pada sejumlah kepercayaan, baik itu implisit maupun eksplisit mengenai asal muasal alam semesta dan hakikat renungan manusia tentang semua subjek (Chapra, 2000: 4-5). Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai suatu kajian yang terletak dalam ajaran Islam secara integral tidak dapat dipisahkan dari aspek akidah, akhlak, dan ibadah.

Pemberdayaan ekonomi muslim adalah menjadikan perekonomian masyarakat Islam yang kondisinya lemah (tidak berdaya) menjadi ekonomi yang kuat sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi bisa barang maupun jasa. Menurut Hogan yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas* menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri atas 5 (lima) tahapan utama yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reason for depowerment/empowerment*);
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*Identify one problem or project*);

4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*); dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Prinsip Ekonomi Islam, Busfi Efriyon mengatakan bahwasanya terdapat kesamaan prinsip antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kerakyatan adalah kekeluargaan, keadilan, pemerataan pendapatan, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, dan kerjasama atau jaringan. Sedangkan dalam prinsip ekonomi Islam terdapat prinsip tauhid, halal dan *thayyib* (baik), kerelaan, tolong-menolong, manfaat, dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam (Agus, 2006: 41).

Prinsip tauhid memiliki makna bahwa keimanan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Saringan moral bertujuan untuk menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisir penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut, yang akan meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, maka setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Dalam ekonomi Islam sumber daya insani yang terpenting. Prinsip halal dan *thayyib* memiliki makna bahwa dalam ekonomi Islam utamanya dalam proses konsumsi, umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, *thayyib*, dan menghindari hal-hal yang secara tegas diharamkan. Halal mengacu pada cara mendapatkan barang yang dikonsumsi, *thayyib* mengacu pada pengaruh makanan terhadap jasmani, utamanya terhadap kesehatan.

Agar dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai nilai ibadah dan mulia di sisi Allah SWT, Islam memberikan panduan untuk diperhatikan, yaitu:

1. Tujuan atau motivasi bekerja mencari nafkah harus benar-benar sesuai dengan syara'. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW. dalam sabdanya, yang artinya: "Barang siapa yang bekerja, dengan niat atau tujuan, untuk kedua orang tuanya, maka ia berada dalam *sabilillah*, dan barang siapa yang bekerja untuk keluarganya, maka ia berada dalam *sabilillah*, dan barang siapa yang bekerja untuk dirinya, untuk menjaga kehormatan dirinya maka ia berada dalam *sabilillah*. Dan barang siapa yang bekerja, dengan niat atau tujuan menumpuk-numpuk harta, maka ia berada di jalan yang sesat atau di jalan setan".

Di dalam hadits tersebut secara tegas disebutkan 3 (tiga) motivasi atau tujuan mencari nafkah yang benar, yang sesuai dengan syara', yaitu: (a) Untuk membantu orang tua; (b) Untuk menghidupi keluarga; dan (c) Untuk menjaga kehormatan pribadi, yaitu agar tidak meminta-minta pada orang lain (Qordhawi, 1993: 423).

Dan tidak dibenarkan bagi setiap muslim atau muslimah bekerja mencari nafkah dengan tujuan menumpuk-numpuk harta, karena tujuan seperti itu membuat yang orang bersangkutan berada di dalam kesesatan atau di jalan setan, sebagaimana ditegaskan oleh hadits di atas. Jadi, seorang muslim atau muslimah wajib memiliki ketiga motivasi atau salah satu dari tiga motivasi ini ketika ia bekerja mencari nafkah agar ia berada dalam jalan Allah, yaitu apabila dia menemui ajalnya dalam bekerja, ia terhitung sebagai orang yang mati syahid, suatu kematian yang sangat mulia dalam Islam.

2. Jenis pekerjaan hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti bekerja di bar untuk menghidangkan minuman keras apalagi menjadi penari yang merangsang hawa nafsu dan hal lain yang dilarang agama. Begitu sebaliknya, jangan sampai pekerjaan itu walaupun halal,

menghalanginya dari melakukan kewajiban agama, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Dan ditambah lagi dengan tetap menjaga kesopanan sebagai perempuan muslimah (Qordhawi, 1993: 423).

Dalam Fikih Muamalah, Nasrun mengungkap prinsip ekonomi Islam adalah bahwa segala perbuatan manusia, termasuk dalam aktivitas berekonomi, haruslah dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, adil, jujur, saling tolong-menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka; tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan akhlak terpuji dan fungsi manusia sebagai *khalifatullah* di bumi, mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, mengharamkan segala yang keji, haram, manipulasi, penipuan, eksploitasi, serta menghalalkan segala yang baik (Agus, 2006: 47).

Suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam perspektif Islam agar dia dapat tetap menempuh jalan lurus yang didasarkan pada hidayah Allah SWT. Ketentuan perekonomian Islam mencakup pengaturan tentang pendapatan, pengeluaran, penyimpanan, penabungan, dan pemilikan. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan perekonomian Islam adalah seperangkat aturan umum yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Ketentuan-ketentuan itu mengatur perekonomian seorang muslim agar dapat mencapai tujuan Islam, yaitu memelihara akal, agama, keturunan, kehormatan dan harta, disamping agar dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan spiritual dan pemenuhan kebutuhan material.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban-jawaban atas rumusan masalah (Sugiyono, 2016: 2).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metodologi *kualitatif*. Metodologi *kualitatif* menurut pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode alamiah. Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menggali data dan informasi baik tentang proses dan mekanisme (Surakhmadi, 1999: 8).

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara secara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Adapun waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang dituju untuk diteliti atau diharapkan informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Arikunto, 2000: 40).

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta masyarakat desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi (Arikunto, 2000: 64).

Dalam penelitian ini metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan informan. Adapun informan pada penelitian ini yaitu pengurus BKM dan masyarakat desa Sokaraja Lor melalui catatan tertulis serta perekaman dari proses wawancara tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung (Arikunto, 2000: 64). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari internet, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016: 224). Sugiyono menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan

gabungan/triangulasi. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kejadian yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamatan berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki (Tanzeh, 2011: 84).

Teknik observasi dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung, yaitu data mengenai keadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan kondisi masyarakat di desa Sokaraja Lor.

Adapun Observasi yang Peneliti gunakan adalah Observasi Non Partisipan (Secara tidak Langsung), dimana peneliti tidak terlibat aktif dalam kehidupan informan, tetapi hanya menjadi pengamat independen.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud memperoleh informasi, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010: 186).

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data/informasi dari anggota dan pengurus BKM serta data dari masyarakat desa Sokaraja Lor mengenai hal-hal yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti dalam memberikan pertanyaan kepada informan berdasarkan instrumen yang sudah peneliti siapkan, tetapi kadang peneliti juga mengajukan pertanyaan yang tidak peneliti siapkan sebelumnya pada pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2000: 202).

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di desa Sokaraja Lor, dan data-data lain yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

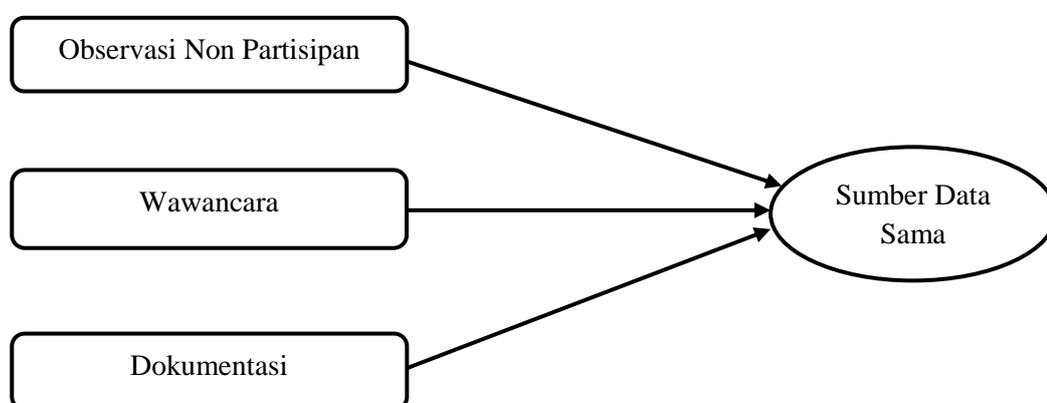
Dengan teknik ini penulis mengharapkan dapat memperoleh bukti konkrit dari penjelasan yang disampaikan sumber data, juga memperoleh data yang belum penulis peroleh dari sumber lainnya, sehingga dokumentasi merupakan cara tambahan yang sangat diperlukan, karena arsiplah penulis dapat memperoleh data tambahan. Disamping itu juga untuk mengetahui monografi maupun data yang mempunyai nilai historis yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Triangulasi

Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2015: 241).

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang serempak. Hal ini dapat digambarkan seperti pada gambar 3.1, sebagai berikut:

Gambar 3.1
Triangulasi (Teknik Pengumpulan Data)



Adapun penerapan teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah penulis mengumpulkan data dengan cara menggabungkan data-data yang telah diperoleh atau dihasilkan dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di atas penulis gabungkan untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini sesuai dengan fokus pembahasannya yakni peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya. Artinya, semua analisis data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. Sementara itu, Bogdan & Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Sugiyono, 2011: 210). Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan pokok permasalahan yang kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan tentang upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Data yang peneliti gunakan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam tiga tahapan menurut Miles & Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan Data Sekaligus Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Pemaparan/Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matrix dan grafik dengan maksud agar data yang dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Setelah data masuk, terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat kesimpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian (Sugiyono, 2011: 212).

I. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan keabsahan dengan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan kegiatan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini uji validitas dan keabsahan data menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2010: 178).

Uji validitas dan keabsahan data dilakukan oleh penulis dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan apa yang dikatakan oleh informan satu dengan informan lainnya tentang upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat. Penulis membandingkan hasil data dari masing-masing subjek penelitian seperti pengurus dan juga anggota BKM, serta masyarakat di desa Sokaraja Lor melalui pengumpulan data yang telah dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan dengan menggunakan teknik ini peneliti memperoleh kevalidan atau kekuatan data terkait bagaimana upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Mugi Rahayu” adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berada di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKM. BKM Mugi Rahayu berbadan hukum dengan akta notaris no. 11 tanggal 16 Oktober 2005 oleh notaris Sri Rahayuningsih, S.H. dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu.

Badan tersebut merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam meyukseskan Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana BLM P2KKP yang merupakan kelanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang kemudian dilanjutkan dengan bantuan dana investasi dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

2. Maksud dan Tujuan BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja

Maksud dan tujuan didirikannya Badan Keswadayaan (BKM) Mugi Rahayu adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah perjuangan untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan.
- b. Mensinergikan masyarakat untuk mampu menanggulangi persoalan kemiskinan.

3. Visi, Misi dan Prinsip BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja

a. Visi BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya tatanan keserasian hubungan antara sesama maupun masyarakat dengan lingkungan.

b. Misi BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja

Membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat kapital sosial dan menggalang solidaritas serta kesatuan sosial sesama warga di wilayahnya agar saling bersinergi dan bekerja sama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang pada akhirnya memperkuat kemandirian masyarakat menuju tatanan masyarakat yang madani.

c. Prinsip BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja

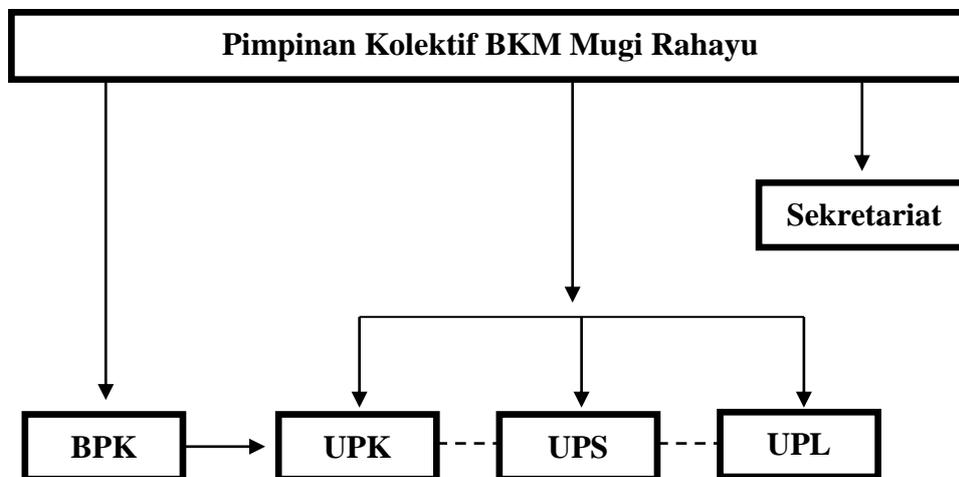
Dalam menjalankan kegiatannya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu memiliki prinsip-prinsip yang digunakan yaitu: demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (manajemen terbuka), serta desentralisasi.

4. Struktur Organisasi BKM Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja

Bentuk organisasi dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja adalah lembaga pimpinan kolektif dari masyarakat warga yang mempunyai sifat kepemimpinan kolektif. BKM Mugi Rahayu adalah milik seluruh masyarakat, bukan milik pemerintah, perorangan, atau kelompok masyarakat tertentu.

Adapun struktur organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BKM Mugi Rahayu



Keterangan:

- : Garis Instruksi
 - - - - - : Garis Koordinasi

Sedangkan struktur kepengurusan BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas masa bakti 2017-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pimpinan Kolektif BKM Mugi Rahayu

No	Nama	L/P	Posisi Dalam BKM	Alamat
1.	Imam Triwarsono, S.Pd.	L	Pimpinan Kolektif BKM	Rt 01 Rw 04
2.	Ahmad Sigit Gunadi, S.E	L	Pimpinan Kolektif BKM	Rt 03 Rw 03
3.	Umar Muslim, S.T	L	Pimpinan Kolektif BKM	Rt 05 Rw 04
4.	Abdullah Fathoni	L	Pimpinan Kolektif BKM	Rt 03 Rw 02
5.	Nasrudin, S.Ag	L	Pimpinan Kolektif BKM	Rt 04 Rw 03
6.	Margiyani, S.Pd	P	Pimpinan Kolektif BKM	Rt 03 Rw 01
7.	Langen Cahyo Wardoyo	L	Pimpinan Kolektif BKM	Rt 01 Rw 01
8.	Warsid, A.Ma	L	Pimpinan Kolektif BKM	Rt 04 Rw 04
9.	Zen Akhmad	L	Pimpinan Kolektif BKM	Rt 04 Rw 03

Tabel 2
Sekretariat dan Unit Pengelola (UP) BKM Mugi Rahayu

No	Nama	L/P	Posisi Dalam BKM	Alamat
1.	Siti Fatiah	P	Sekretaris	Rt 01 Rw 02
2.	Nor Setiani	P	Manager UPK	Rt 01 Rw 04
3.	Sri Atin	P	Staff UPK	Rt 02 Rw 04
4.	Supriyati	P	Manager UPS	Rt 04 Rw 04
5.	Paryanto	L	Manager UPL	Rt 02 Rw 01

Tabel 3
Badan Pengawas BKM Mugi Rahayu

No	Nama	L/P	Posisi Dalam BKM	Alamat
1.	Nur Hidayat	L	Badan Pengawas	Rt 03 Rw 01
2.	A. Sigit Gunadi	L	Badan Pengawas	Rt 03 Rw 04
3.	A. Sodikun	L	Badan Pengawas	Rt 01 Rw 02

B. Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

1. Rencana Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Sebagai upaya yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas adalah dengan merencanakan program-program yang ditujukan untuk masyarakat dengan harapan masyarakat menjadi lebih berdaya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam upaya tersebut, BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor memiliki program-program yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan dan Pembenahan Organisasi

Dalam hal ini, BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor memiliki program sebagai upaya pembenahan organisasi dengan tujuan agar organisasi menjadi lebih baik lagi. Adapun bentuk programnya adalah:

- 1) Kegiatan rapat-rapat BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor
- 2) Kegiatan Pendidikan dan Latihan

b. Administrasi dan Pembukuan

Administrasi dan pembukuan adalah salah satu program yang dimiliki BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor dengan tujuan agar BKM Mugi Rahayu menjadi lebih administratif dalam segala hal, terlebih dalam laporan-laporan dan arsip-arsip organisasi.

c. Pembukuan Keuangan

Pembukuan keuangan adalah program dari BKM Mugi Rahayu dengan tujuan agar segala jenis catatan keuangan organisasi baik yang bersifat pengeluaran maupun pemasukan bisa terdata dengan baik, sehingga catatan-catatan keuangan organisasi bisa terbukukan dengan sistematis.

d. Unit-unit Pengelola (UP)

Unit-unit Pengelola (UP) BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor memiliki program-program dimana secara garis besar program-program tersebut ditujukan untuk pelayanan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih berdaya. Adapun program dari Unit Pengelola (UP) BKM Mugi Rahayu adalah sebagai berikut:

- 1) Unit Pengelola Keuangan
 - a) Pelayanan pemberian pinjaman modal usaha pada masyarakat.
 - b) Melakukan pertemuan yang diadakan KSM-KSM, untuk pembinaan dan penguatan KSM.
- 2) Unit Pengelola Lingkungan
 - a) Pendampingan KSM pada BLM guliran.
 - b) Mengelola dana lingkungan produktif.

3) Unit Pengelola Sosial

- a) Pendampingan KSM pada BLM I dan II.
- b) Mengelola dana pinjaman sosial produktif.

2. Realisasi Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Sebagai peran yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas adalah dengan merencanakan program-program yang ditujukan untuk masyarakat dengan harapan masyarakat menjadi lebih berdaya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam upaya tersebut, BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor memiliki program-program yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan dan Pembenahan Organisasi

Adapun program yang terealisasi adalah:

- 1) Kegiatan rapat-rapat BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor
 - a) Rapat BKM terbatas
 - b) Rapat BKM lengkap
 - c) Rapat dengan KSM
 - d) Rapat dengan KMP
 - e) Rapat dengan KMW
 - f) Rapat dengan BAPPEDA
- 2) Kegiatan Pendidikan dan Latihan
 - a) Mengikuti pembekalan anggota BKM
 - b) Mengikuti penguatan anggota BKM
 - c) Pelatihan tenaga UPK sebanyak 4 (empat) orang
 - d) Mengikuti pertemuan forum UPK

b. Administrasi dan Pembukuan

Adapun realisasi dari program administrasi dan pembukuan yaitu melakukan pembukuan terhadap segala jenis laporan dan arsip organisasi. Pembukuan yang telah direalisasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Buku daftar anggota KSM
- 2) Buku daftar PIMKO BKM
- 3) Buku daftar tenaga Unit Pengelola (UP)
- 4) Buku tamu
- 5) Buku agenda surat keluar
- 6) Buku agenda surat masuk
- 7) Buku notulen rapat
- 8) Buku keputusan rapat
- 9) Buku daftar hadir rapat
- 10) Buku kegiatan
- 11) Buku inventaris

c. Pembukuan Keuangan

Program pembukuan keuangan yang dilakukan oleh BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor adalah sebagai berikut:

- 1) Buku kas fisik
- 2) Buku kas ekonomi
- 3) Buku hutang
- 4) Buku piutang
- 5) Buku catatan biaya
- 6) Buku catatan pendapatan
- 7) Buku transaksi harian
- 8) Buku bank
- 9) Buku modal
- 10) Buku laporan laba/rugi
- 11) Buku neraca
- 12) Buku perubahan modal
- 13) Buku angsuran fisik

- 14) Buku angsuran ekonomi
 - 15) Buku jurnal uang masuk harian
 - 16) Buku jurnal uang keluar harian
 - 17) Buku jurnal uang masuk bulanan
 - 18) Buku jurnal uang keluar bulanan
- g) Unit-unit Pengelola (UP)

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terdapat 3 (tiga) unit pengelola kegiatan dengan program-programnya yang telah terealisasi yaitu:

- 1) Unit Pengelola Keuangan (UPK)
 - a) Pemberian pinjaman modal usaha pada masyarakat.
 - b) Menghadiri pertemuan yang diadakan KSM-KSM, untuk pembinaan dan penguatan KSM.
- 2) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)
 - a) Melakukan kegiatan lingkungan yakni pemasangan listrik warga 8 (delapan) unit alokasi dana guliran lingkungan.
 - b) UPL mengelola kegiatan pinjaman lingkungan produktif.
- 3) Unit Pengelola Sosial (UPS)
 - a) Melakukan kegiatan santunan orang-orang jompo dan anak-anak difabelitas.
 - b) Pencairan dana sosial produktif bergulir untuk KSM SBR.
 - c) Pencairan dana sosial produktif bergulir untuk KSM Tani Jaya.
 - d) UPS mengelola kegiatan pinjaman sosial produktif.

C. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Sebagaimana pengamatan peneliti pada BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor, peneliti melihat bahwa BKM Mugi Rahayu dapat dikatakan baik dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BKM Mugi Rahayu dapat dilihat antara lain:

1. Sistem pencatatan keuangan, transaksi-transaksi, serta pembukuan yang sudah rapi. Hal ini dapat dilihat pada neraca saldo setiap bulan yang dibuat oleh pengurus BKM Mugi Rahayu. Pencatatan keuangan tersebut dalam bentuk pencatatan transaksi-transaksi organisasi dan juga buku kas umum organisasi.
2. BKM Mugi Rahayu mampu menganalisis permasalahan yang terdapat pada lingkungan masyarakat. BKM Mugi Rahayu mampu melihat kebutuhan dan peluang yang ada. BKM Mugi Rahayu mampu merumuskan strategi yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya, pembuatan perencanaan program-program sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pengelolaan dana program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja yang selalu diupayakan untuk dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan dana bergulir.

Dalam menjalankan kelembagaan, BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor melakukan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal. Hal ini sangat membantu BKM dalam menjalankan programnya karena hal ini akan sangat membantu dan akan mendorong BKM lebih mudah mencapai tujuan yang telah direncanakan yaitu pemberdayaan masyarakat desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

BKM Mugi Rahayu menyadari sepenuhnya bahwa melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik di desa Sokaraja Lor diperlukan upaya serius dari waktu ke waktu dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. Harapannya dapat melahirkan konsep dan strategi yang bagus dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Semua itu dilakukan BKM Mugi Rahayu melalui proses sosialisasi yang luas dan berkelanjutan. Komunikasi tersebut dilakukan melalui media pertemuan rutin warga di setiap RT/RW/PKK dan lain-lain.

Sebagai moderator dan fasilitator, BKM Mugi Rahayu menjadikan lembaga sebagai seorang pemandu atau guru bagi masyarakat untuk

mendukung dan mendampingi masyarakat dalam upaya pengembangan masyarakat dan menjadikan masyarakat yang lebih berdaya. BKM Mugi Rahayu senantiasa berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat. Sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut, masyarakat berani mengemukakan pendapatnya.

BKM Mugi Rahayu memosisikan diri sebagai narasumber masyarakat, karena tugas dari BKM di sini bukan hanya melepaskan masyarakat dari kemiskinan. BKM juga harus dapat membuat masyarakat lebih berdaya agar mereka mampu menjadi masyarakat yang lebih maju.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas memiliki program 3 (tiga) bidang dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pinjaman untuk modal usaha atau membantu meringankan biaya kebutuhan rumah tangga saat dibutuhkan. Bidang-bidang tersebut diantaranya yaitu bidang ekonomi bergulir, bidang sosial bergulir, dan bidang lingkungan bergulir (Wawancara dengan ibu Siti Fatiah, anggota BKM Sokaraja Lor, pada tanggal 25 Juni 2019).

Peran yang dilakukan oleh BKM Mugi Rahayu dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor antara lain adalah dengan memberdayakan SDM dan memberikan dana/pinjaman untuk usaha masyarakat, dengan Program Tridaya BKM. Hal tersebut sebagaimana dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan bapak Imam Triwarsono selaku Koordinator/Ketua BKM Sokaraja Lor pada tanggal 20 Juli 2020. Beliau menjelaskan bahwa:

“BKM Mugi Rahayu berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga memberikan dana pinjaman untuk usaha masyarakat, dengan Program Tridaya BKM, yaitu:

Unit Pemberdayaan Keuangan (UPK) merupakan gagasan yang di tuangkan ke dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dibagi menjadi 2: Simpan Pinjam Kelompok dan simpan pinjam individu (mengelola keuangan/permodalan untuk usaha bukan untuk konsumtif).

Unit Pemberdayaan Lingkungan (UPL) merupakan gagasan yang dituangkan ke dalam peningkatan kapasitas lingkungan, Seperti: jalan setapak dan bedah rumah.

Unit Pemberdayaan Sosial (UPS) merupakan gagasan yang dituangkan ke dalam listrik (pemasangan listrik bagi masyarakat yang belum mampu/kurang dalam ekonominya maka dipinjamkan dana untuk pemasangannya dan cara pengembalian dilakukan dengan mengangsur sesuai kemampuan sampai lunas dalam pembayarannya. Peternakan (peternakan sapi yang sedang berlangsung di BKM Sokaraja/kepada masyarakat yang memiliki SDM dan mau berternak/memiliki potensi untuk beternak sapi dimana diberi modal sapi dengan cara pengembalian ke BKM berupa angsuran dalam beternak sapi) yang bertujuan: agar Masyarakat berfikir maju/mampu untuk berternak sehingga bisa memberdayakan masyarakat dan memberikan pemasukan untuk keluarga/masyarakat tersebut)".

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa BKM Mugi Rahayu memiliki program unggulan yaitu program pemberdayaan dalam hal peternakan dan usaha. Dalam bidang peternakan, BKM Mugi Rahayu melakukan pemberdayaan dalam peternakan sapi, dan dalam bidang usaha, BKM Mugi Rahayu melakukan pemberdayaan dalam bidang usaha batik. Hal tersebut sebagaimana beliau jelaskan dalam wawancara:

"Program unggulan BKM Mugi Rahayu Sokaraja Lor adalah peternakan sapi dan batik, karena usaha dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sosial (pertenakan sapi dan batik) ini memiliki potensi berpenghasilan cukup baik dan memberikan peluang lapangan kerja dalam penerapan usahanya. Seperti: Batik Luqman, dimana sekarang menjadi mitra untuk BKM Mugi Rahayu Sokaraja Lor, yang berawal hanya bermodal dari pinjaman modal untuk usahanya, dimana sekarang memiliki 30 orang pekerja di Batik Luqman Sokaraja".

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui pelatihan bagi masyarakat yang dalam hal ini adalah pelatihan pembuatan kerajinan dari barang bekas (plastik bekas) sebagaimana beliau jelaskan:

"Bentuk pelatihan yang dilakukan BKM Mugi Rahayu untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan melakukan pelatihan Membuat bunga dari plastik bekas (daur ulang plastik) yang difungsikan untuk menjadi prakarya yang indah. Adapun peserta dari pelatihan tersebut adalah ibu-ibu PKK yang dimana diambil 2/3 orang dari masing-masing perwakilan setiap RT yang bertujuan agar bisa menjadikan masyarakat berdaya dan memiliki kreatifitas yang di sisi lain bisa memanfaatkan daur ulang/mengurangi sampah plastik, serta juga bisa memberi peluang untuk usaha masyarakat".

Salah satu hasil yang bisa dilihat dari upaya pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor adalah adanya peningkatan pada bidang usaha sebagaimana dijelaskan oleh bapak Imam Triwarsono selaku Koordinator/Ketua BKM Sokaraja Lor sebagai berikut:

“Sebelum adanya BKM Mugi Rahayu, masyarakat sekitar masih konsumtif dan kurang bergerak dalam pengelolaan keuangannya seperti halnya tidak ada modal dalam mencoba usaha atau tidak ada aktifitas untuk bekerja. Sekarang warga yang diberi modal untuk berternak sapi dan batik untuk pengembangan usaha, sekarang bisa memberi lapangan kerja untuk masyarakat sekitar”.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas senantiasa berupaya melakukan pemberdayaan pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat terbantu dalam permodalan sehingga dapat mengembangkan usahanya. Selain dari pada itu, program tersebut juga dilakukan sebagai usaha dalam pengembangan perekonomian sehingga diharapkan bisa terciptanya perbaikan kesejahteraan hidup pada masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas.

D. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada BKM Mugi Rahayu di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Perspektif Ekonomi Islam

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, pemerintahan dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan, politik, hukum pendidikan dan sebagainya. Pemberdayaan perempuan mengandung tiga kekuatan di dalam dirinya yakni *power to*, yaitu kekuatan untuk berbuat; *power with*, yaitu kekuatan untuk membangun kerjasama; dan *power within*, yaitu kekuatan dalam diri pribadi manusia (Widiastono, 2004: 19-20).

Manusia secara sendiri-sendiri tidak akan mampu mencukupi berbagai keinginan dan kebutuhan, meskipun ia seorang yang serba bisa dan memiliki banyak kelebihan dan keahlian. Dari sini dapat diartikan bahwa manusia

sesungguhnya memiliki kondisi keterbatasan dan kelemahan karena selain makhluk individu, manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Untuk itulah maka terciptalah kerjasama, dimana hal itu dilakukan karena adanya faktor saling membutuhkan satu sama lain, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

Artinya: *“..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”* (Q.S. Al-Maidah: 2).

Maksud ayat di atas adalah manusia harus saling tolong menolong dan bekerjasama antar sesama manusia karena manusia adalah makhluk sosial dan setiap manusia memiliki keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Berangkat dari keterbatasan tersebut, maka manusia membutuhkan suatu sarana atau alat untuk mencapai tujuan, sarana atau alat tersebut adalah organisasi.

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus menerus di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya serta adil dan Negara menjadi semakin makmur.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor bertujuan

untuk memberikan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Segala aturan yang Allah SWT turunkan mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, kerugian pada seluruh ciptaanya.

Islam menyemangati muslim untuk menikmati keindahan yang disediakan oleh Allah SWT dan tidak menetapkan batasan-batasan kuantitatif pada perluasan pertumbuhan materil pada masyarakat muslim. Bahkan perjuangan untuk kesejahteraan materiil adalah tindakan kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”* (Q.S. Al-Jumu'ah: 10).

Maksud ayat di atas adalah Allah SWT memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk mencari kehidupan dunia dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti strategi pemberdayaan yang dilakukan BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor melakukan upaya untuk memberdayakan anggotanya agar anggotanya menjadi berdaya dan sejahtera.

Dari berbagai pembahasan yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor merupakan lembaga atau organisasi yang merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan serta melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang ditujukan untuk kemajuan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor merupakan lembaga atau organisasi yang merupakan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan serta melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang ditujukan untuk kemajuan masyarakat.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas memiliki program-program untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu bidang ekonomi bergulir, bidang sosial bergulir, dan bidang lingkungan bergulir.

Upaya yang dilakukan oleh BKM Mugi Rahayu dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor antara lain adalah dengan memberdayakan SDM dan memberikan dana/pinjaman untuk usaha masyarakat, dengan Program Tridaya BKM.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih meningkatkan kreatifitas agar bisa menjadi masyarakat yang mandiri dan bisa menjadi masyarakat yang lebih maju.
2. Masyarakat harus lebih antusias dalam melakukan pemberdayaan pada diri mereka sendiri karena BKM Mugi Rahayu telah memfasilitasi beberapa upaya pemberdayaanya.
3. BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas harus lebih meningkatkan kapasitas dan kredibilitasnya dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat.

4. Pemerintah harus lebih mendukung terhadap segala program-program yang terdapat dalam organisasi atau lembaga masyarakat yang tujuannya untuk memajukan masyarakat itu sendiri.

Banyumas, 15 Juni 2021

Penulis



Farda Nurjanah
NIM: 1423203094

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Anak Agung Istri. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah*. Jurnal Ketahanan: Vol. 23, No. 1, April.
- Anwas, Oos M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- (2000). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy'arie, Musa. (1997). *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Lesfi.
- Damsar, Indrayani. (2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana.
- Desiati, Rosita. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata*. DIKLUS. Edisi XVII. No.01, September.
- Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2002). *Pedoman Teknis P2KP-2*. Jakarta: P2KP.
- Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2002). *Petunjuk Teknis Pelaksana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)*. Jakarta: P2KP.
- Edi, Suharto. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fahrudin, Adi. (2011). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humanoria.
- Huda, Miftachul. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutomo, Mardi Yatmo. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.
- Kartasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cisendo.

- Mahyana, Itba' Muhammad. (2010). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kelurahan Kalisuren Bogor*, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustangin, dkk. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*. Jurnal Pemikiran dan penelitian Sosiologi: Vol. 2, No. I, Desember.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Direksi Cipta.
- Noor, Munawar. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah: Vol.I, No.2, Juli.
- Onny, Prijono, S. dan Pranaka. (1996). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Purwanto, April. (2007). *Modul Kuliah Empowerment. Panduan Umum Pemberdayaan Masyarakat*. Jurusan PMI UIN Sunan Kalijaga.
- Royani, Ida. (2012). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Sosial Di Kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi*, Skripsi. Malang: UIN Malang.
- Setiadi, Elly M. Kolip, Usman. (2015). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soelaeman, M. Munandar. (2009). *Ilmu Sosial Dasar-Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

- Sumodiningrat, Gunawan. (1996). *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata.
- . (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surakhmadi. (1999). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Aneka.
- Sumodinigrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tambunan, Tulus T. H. (2012). *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tanzeh, Ahmad. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Theresia, Aprillia, dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tulusan, Femy M. G. dan Londa, Very Y. (2014). *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. Jurnal LPPM Bidang EksosBudKum. Vol. 1 No. 1.
- Usman, Sunyoto. (1998). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Suparno Eko. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanti, Kurnia, dkk. (t.th). *Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik: Vol. No. 1, No. 10.
- Wrihatolono, Randy R. Dan Dwijowojoto, Riant Nugroho. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

LAMPIRAN



**WADAYAAN MASYARAKAT BKM MUGI RAHAYU DESA
SOKARAJA LOR KEC .SOKARAJA KAB.BANYUMAS
AKTA NOTARIS NO. 11 TGL16 Oktober 2005**

AlamatSecretariat :Jln. Imam Bonjol No. 01 SokarajaLor☎0813 2685 5701

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 00173/001./2021

Keswadayaan Masyarakat BKM MUGI RAHAYU Desa Sokaraja Lor,
Kecamatan Sokaraja Lor, menerangkan bahwa :

Nama : Farda Nurjanah
NIM : 1423203094
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN

Purwokerto

Judul Skripsi : Peran BKM dalam Pemberdayaan
Masyarakat di Desa Sokaraja Lor,
Kec.Sokaraja, Kab.Banyumas

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di BKM Desa Sokaraja Lor, kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan judul: “ **Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sokaraja Lor, Kec.Sokaraja Lor, Kab.Banyumas** “.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sokaraja Lor, 18 Juli 2021



Imam Triwarsono, S.Pd

INSTRUMENT WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pengurus BKM Mugi Rahayu

1. Upaya apa yang dilakukan oleh BKM Mugi Rahayu dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sokaraja Lor?.
2. Apa saja program unggulan BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor?.
3. Seperti apa bentuk pelatihan yang dilakukan BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor untuk memberdayakan Masyarakat?.
4. Bagaimana perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor?.
5. Seperti apa bentuk kegiatan yang sifatnya rutin (kontinu) dan kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu?.
6. Hambatan apa yang dialami dalam melaksanakan kinerja BKM Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor?.

B. Wawancara Dengan Masyarakat/Anggota BKM Mugi Rahayu

1. Bagaimana peran BKM Mugi Rahayu terhadap kelompok masyarakat?.
2. Manfaat apa yang didapatkan dari adanya BKM Mugi Rahayu?
3. Program Apa yang sudah dibantu oleh BKM Mugi Rahayu?
4. Seperti apa jenis dari bantuan yang diberikan oleh BKM Mugi Rahayu?
5. Bagaimana kontribusi BKM Mugi Rahayu dalam memberdayakan masyarakat menurut anda?.
6. Bagaimana perkembangan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BKM Mugi Rahayu menurut anda?.
7. Apa yang anda harapkan dengan adanya BKM Mugi Rahayu?.

RR BULAN JANUARI S/D DESEMBER

TAHUN 2020

1. JANUARI	94,96 %
2. FEBRUARI	94,61 %
3. MARET	94,16 %
4. APRIL	98,08 %
5. MEI	93,68 %
6. JUNI	94,09 %
7. JULI	94,61 %
8. AGUSTUS	93,92 %
9. SEPTEMBER	95,58 %
10. OKTOBER	93,90 %
11. NOVEMBER	93,50 %
12. DESEMBER	92,49 %

SOKARAJA LOR, 31 DESEMBER 2020

UPK



NOR SETIANI

REKAP NERACA UPL
BKM MUGI RAHAYU DESA SOKARAJA LOR
PERIODE TAHUN 2020

No. Akun	Nama Akun	Bulan:											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
11.01	Kas	Rp. 5.685.600	2.644.600	3.629.600	5.093.600	6.173.600	7.233.600	537.600	1.993.600	3.535.600	5.104.600	6.342.600	26.600
11.02	Bank UPL												
11.03	Pinjaman KSM	Rp. 60.381.500	58.981.000	58.000.900	56.658.300	55.601.000	54.558.800	61.349.900	60.007.100	58.609.700	57.185.400	56.007.700	62.366.100
11.04	Cadangan Resiko Kredit	Rp.											
11.05	Pinjaman Lain-lain	Rp.											
11.06	Inventaris dan harta tetap	Rp.											
11.07	Akumulasi penyusut inv & harta tetap	Rp.											
	Jumlah:	Rp. 66.067.100	61.625.600	61.630.500	61.751.900	61.774.600	61.792.400	61.887.500	62.000.700	62.145.300	62.290.000	62.350.300	62.392.700
	PASSIVA :												
2.1	Dana prasarana dari laba UPK	Rp. 15.703.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000
2.2	Dana BOP untuk Sekretaris 60 %	Rp.											
2.3	Modal awal dana bergulir	Rp. 45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000
2.4	Modal PNPM	Rp.											
2.5	Pemupukan Modal dan Laba 40 %	Rp. 4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400
2.6	Laba bulan berjalan	Rp. 9.700	9.700	68.200	73.100	194.500	217.200	235.000	330.100	443.300	587.900	732.600	792.900
2.7	Laba Bulan ini	Rp. 9.700	58.500	4.900	121.400	22.700	17.800	95.100	113.200	144.600	144.700	60.300	42.400
	Beban Lebaran												
	Jumlah:	Rp. 66.067.100	61.625.600	61.630.500	61.751.900	61.774.600	61.792.400	61.887.500	62.000.700	62.145.300	62.290.000	62.350.300	62.392.700

Mengetahui:
Koordinator/Anggota BKM

IMAM TRI WARSONO
(Imam Tri Warsono, Spd)



(Paryanto)

**REKAP LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BKM MUGI RAHAYU DESA SOKARAJA LOR
PERIODE TAHUN 2020**

	BULAN											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
Saldo Awal:												
Kas	Rp 1.843.400	13.664.400	1.255.700	760.700	2.265.700	1.572.700	4.787.700	275.700	818.200	368.200	368.200	368.200
Bank BSM I	Rp 5.135.863	5.131.845	5.125.818	5.119.707	5.113.651	5.107.395	5.101.284	5.095.464	5.095.464	5.078.172	5.072.296	5.072.296
Bank BSM II	Rp 208.809	199.409	2.192.541	7.187.000	5.181.097	5.174.965	1.478.432	1.471.432	471.432	449.156	441.656	441.656
Uraian Saldo Awal	Rp 7.188.172	18.075.454	13.574.059	13.067.407	12.560.348	11.855.060	11.347.436	6.842.596	6.385.096	5.895.528	5.895.528	5.895.528
Memasukan:												
Terima Abasas Dana U UPS	Rp 4.092.500											
Terima Abasas Dana U UPL	Rp 4.092.500											
Terima Abasas Dana U BGR dan UPK	Rp 16.370.500											
Bunga Simpanan Bank BSM	Rp 3.282	2.305	4.185	3.676	3.390	2.970	2.160		5.432	1.624		1.792
Bunga Simpanan Bank BSM	Rp 501.000											
Terima Abasas Dana dan UPL	Rp 717.500				2.000.000							
Terima Abasas Dana dan UPS	Rp 2.000.000											
Pengaman Pinak Ks 3	Rp 25.777.282	2.002.305	4.185	3.676	2.003.390	2.970	2.160					1.792
Uraian Memasukan	Rp 32.963.454	21.071.789	13.879.244	13.071.083	14.983.738	11.859.030	11.349.596	6.842.596	6.385.096	5.897.152	5.897.152	6.893.944
Pengeluaran BKM:												
Pengeluaran	Rp 400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
Honor Siskelara	Rp 114.000	123.200										
Biaya F.C.A.T.R	Rp 95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	67.500	50.000			
Pengembalian Pinak ke-3	Rp 536.500	665.000										
Biaya Transport												
Biaya Kantor												
Konsumsi Audit												
Biaya Audit												
Biaya Rapat												
Biaya Pemulu BKM												
Uraian Pengeluaran	Rp 1.145.500	1.293.200	495.000	495.000	495.000	495.000	492.000	457.500	450.000			
Pengembalian Pinak Ks 3	Rp 15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Biaya/Admnan Bank I & II	Rp 4.602.500	490.500										200
Biaya RW/RT												
Biaya Audit												
Biaya Pemeliharaan (Inventaris)												
Pengembalian Dana UPK ke UPL+UPS	Rp 8.195.000	250.000			2.198.000							
Uraian Pengeluaran	Rp 13.948.000	7.443.700	510.837	510.735	2.708.878	510.894	4.907.000	457.500	450.000	15.000	15.000	15.200
Saldo Akhir	Rp 13.664.400	1.255.700	760.700	2.265.700	1.572.700	4.787.700	275.700	818.200	368.200	368.200	368.200	368.200
Bank BSM I	Rp 5.131.845	5.125.818	5.119.707	5.113.651	5.107.395	5.101.284	5.095.464	5.095.464	5.078.172	5.072.296	5.066.588	5.066.588
Bank BSM II	Rp 199.409	2.192.541	7.187.000	5.181.097	5.174.965	1.478.432	1.471.432	471.432	449.156	441.656	434.156	434.156
Uraian Saldo Akhir	Rp 19.075.454	13.574.059	13.067.407	12.560.348	11.855.060	11.347.436	6.842.596	6.385.096	5.895.528	5.897.152	5.897.152	6.348.744

Mengetahui
Kepala Desa Mugi Rahayu
Sekaraja Lor
(Sidi Parlanah)

Sekaraja Lor
(Sidi Parlanah)

REKAP NERACA UPL
BKM MUGI RAHAYU DESA SOKARAJA LOR
PERIODE TAHUN 2020

No. Akun	Nama Akun	Bulani:											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
11.01	Kas	Rp. 5.685,600	2.644,600	3.629,600	5.093,600	6.173,600	7.233,600	537,600	1.993,600	3.535,600	5.104,600	6.342,600	26,600
11.02	Bank UPL	Rp.											
11.03	Pinjaman KSM	Rp. 60.381,500	58.981,000	58.000,900	56.658,300	55.601,000	54.558,800	61.349,900	60.007,100	58.609,700	57.185,400	56.007,700	62.366,100
11.04	Cadangan Resiko Kredit	Rp.											
11.05	Pinjaman Lain-lain	Rp.											
11.06	Inventaris dan harta tetap	Rp.											
11.07	Akumulasi penyusut inv & harta tetap	Rp.											
	Jumlah:	Rp. 66.067,100	61.625,600	61.630,500	61.751,900	61.774,600	61.792,400	61.887,500	62.000,700	62.145,300	62.290,000	62.350,300	62.392,700
	PASSIVA :												
2.1	Dana prasarana dari laba UPK	Rp. 15.703,000	11.203,000	11.203,000	11.203,000	11.203,000	11.203,000	11.203,000	11.203,000	11.203,000	11.203,000	11.203,000	11.203,000
2.2	Dana BOP untuk Sekretaris 60 %	Rp.											
2.3	Modal awal dana bergulir	Rp. 45.790,000	45.790,000	45.790,000	45.790,000	45.790,000	45.790,000	45.790,000	45.790,000	45.790,000	45.790,000	45.790,000	45.790,000
2.4	Modal PNPM	Rp.											
2.5	Pemupukan Modal dan Laba 40 %	Rp. 4.564,400	4.564,400	4.564,400	4.564,400	4.564,400	4.564,400	4.564,400	4.564,400	4.564,400	4.564,400	4.564,400	4.564,400
2.6	Laba bulan berjalan	Rp. 9,700	9,700	68,200	73,100	194,500	217,200	235,000	330,100	443,300	587,900	732,600	792,900
2.7	Laba Bulan ini	Rp. 9,700	58,500	4,900	121,400	22,700	17,800	95,100	113,200	144,600	144,700	60,300	42,400
	Bilangan Lebaran												
	Jumlah:	Rp. 66.067,100	61.625,600	61.630,500	61.751,900	61.774,600	61.792,400	61.887,500	62.000,700	62.145,300	62.290,000	62.350,300	62.392,700

Mengetahui:

 Koordinator/ Anggola BKM
 (Imam Tri Warsono, Spd)



PENCAIRAN UPK JANUARI S/D DESEMBER 2020
BKM KUGI RAHAYU
DESA SOKARAJA LOR

JANUARI	2 KSM	RP. 41.000.000,-
FEBRUARI	1 KSM	RP. 15.000.000,-
MARET	1 KSM	Rp. 12.000.000,-
APRIL	1 KSM	Rp. 30.000.000,-
MEI	1 KSM	Rp. 18.000.000,-
JUNI	2 KSM	Rp. 45.000.000,-
JULI	2 KSM	RP. 55.000.000,-
AGUSTUS	5 KSM	RP. 97.000.000,-
SEPTEMBER	2 KSM	Rp. 31.000.000,-
OKTOBER	3 KSM	RP. 49.000.000,-
NOVEMBER	1 KSM	RP. 15.000.000

JUMLAH 11 KALI PENCAIRAN 21 KSM RP. 408.000.000,-

Mengetahui



IMAM TRI WARSONO,SPD

Sokaraja Lor, 31 Desember 2020
Unit Pengelola Keuangan



NOR SETIANI

**PEMBAGIAN ALOKASI LABA DARI UPK
TUTUP BUKU TAHUN 2020
BKM MUGI RAHAYU
DESA SOKARAJA LOR KECAMATAN SOKARAJA**

Pada hari Ini Jumaat tanggal tiga puluh satu Desember Tahun 2020 telah dilaksanakan Rembug Pembahasan Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2020 dan pembagian Alokasi Laba untuk BOP, Sosial dan Lingkungan, IPTW dan Pemupukan Modal, sesuai AD ART BKM Mugi Rahayu. Di Sekretariat pada pukul. 19.30 Wlb yang dihadiri oleh.....Orang. Adapun Hasil Rembug pembahasan pembagian laba dari Alokasi Jasa UPK telah di sepakati bersama sesuai AD ART sbb :

Pendapatan Laba UPK Tahun 2019 Bersih RP. 38.805.188

Untuk BOP Sekretariat 40 %	RP.	15.552.752
Untuk Pemupukan Modal 30 %	RP.	11.641.564
Untuk Lingkungan 10 %	RP.	3.880.518
Untuk Sosial 10 %	RP.	3.880.518
Untuk IPTW 10 %	RP.	3.880.518

Demikian hasil Pembahasan Pembagian Alokasi Laba dana UPK Tahun 2020 ini dibuat untuk dilaksanakan sebalik baliknya.

Sokaraja Lor, 31 Desember 2020

Koordinator/anggota BKM :

- 01 Imam Tri Warsono, S.pd
- 02 Abdullah Fatoni
- 03 Umar Muslim, ST
- 04 Nashrudin, S.Ag
- 05. A.Sigit Gunadi.SE
- 06 Margiyani, Spd
- 07 Warsid .AM.d
- 08 Zen Achmad
- 09. Langen cahyo .W

Unit Pengelola Keuangan

UPK



Nor Setiani

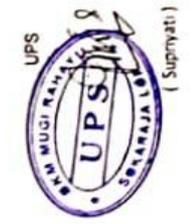
**REKAP LAPORAN LABA RUGI AKUMULATIF UPS
BKM MUGI RAHAYU DESA SOKARAJA LOR
PERIODE TAHUN 2020**

No. Akun	Nama Akun	Bulan:																
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
	PENDAPATAN :																	
41.01	Bunga Pinjaman KSM	Rp 430 000	430 000	430 000	630 000	370 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
41.02	Pendapatan Lain dari Pinjaman	Rp 16 988	10 700	16 740	18 480	19 250	23 498	25 708	28 768	30 926	26 635	10 933	12 827					
42.01	Bunga Siabungan di Bank																	
42.02	Pendapatan lain non oprasional																	
	Jumlah :	Rp 446 988	440 700	446 740	648 480	389 250	453 498	455 708	458 768	860 926	486 635	470 933	472 827					
	BIAYA :																	
5.1	Biaya Honor UPL	Rp 300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
51.01	Biaya Kantor/ Foto copy & atk	Rp 105 000	35 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	12 000	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
51.02	Biaya Transportasi & Komunikasi	Rp 7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
51.03	Administrasi Bank	Rp 3 398	2 140	3 348	3 696	3 850	4 700	5 142	5 754	6 185	5 327	2 187	2 565					
51.04	Pajak Bank	Rp 43 000	43 000	43 000	63 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
52.05	Biaya CRK																	
52.06	Bonus Tahunan																	
52.07	Pendampingan KSM																	
52.08	Jumlah Laba Rugi	Rp 31 090	38 060	57 892	254 284	32 900	68 298	70 066	75 514	431 241	808	82 246	762					
	laba / Rugi tahun berjalan	Rp 446 988	440 700	446 740	648 480	389 250	453 498	455 708	458 768	860 926	486 635	470 933	472 827					
	Jumlah Laba Rugi	Rp 446 988	440 700	446 740	648 480	389 250	453 498	455 708	458 768	860 926	486 635	470 933	472 827					

Mengetahui:
Koordinator/ Anggota BKM



(Ismail Tri Warsono, Spd)



**REKAP NERACA SEKRETARIAT BKM
BKM MUGI RAHAYU DESA SOKARAJA LOR
PERIODE TAHUN 2020**

AKTIVA :	Bulan:											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1-Harta												
1.1 Kas	Rp. 13.684.400	1.255.700	760.700	2.295.700	1.572.700	4.767.700	275.700	818.200	368.200	368.200	368.200	368.200
1.2 Bank BKM (BPD I)	Rp. 5.131.645	5.125.818	5.119.707	5.113.551	5.107.365	5.101.284	5.095.464	5.089.464	5.083.464	5.077.464	5.071.464	5.065.464
1.3 Bank BKM (BPD II)	Rp. 166.459	7.192.541	7.187.000	5.181.097	5.174.985	1.478.452	1.471.432	471.432	471.432	471.432	471.432	471.432
2-Harta tetap												
2.1 Inventaris dan harta tetap	Rp. 44.151.000	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300
Jumlah:	Rp. 63.166.454	52.873.359	52.366.707	51.859.648	51.154.360	50.648.736	48.141.896	45.684.396	45.234.396	45.184.828	45.181.452	45.181.452
PASSIVA :												
2-Kewajiban												
2.1 Dana Prasarana Lingkungan	Rp.											
2.1.1 Terapan Dana Lingkungan	Rp.											
Pinjaman Pihak Ke 3	Rp.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000						
	Rp.											
2.2 Dana BOP	Rp. 19.015.454	11.574.059	11.067.407	10.560.348	7.955.060	7.347.436	6.842.596	6.385.096	5.935.096	5.885.528	5.882.152	5.868.744
2.3 Terapan Dana Sosial Produktif	Rp.											
2.4 Donasi Inventaris BKM	Rp.											
2.5 Dana PKM	Rp.											
2.6 Inventaris dan harta tetap	Rp. 44.151.000	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300	39.299.300
	Rp.											
Jumlah:	Rp. 63.166.454	52.873.359	52.366.707	51.859.648	51.154.360	50.648.736	48.141.896	45.684.396	45.234.396	45.184.828	45.181.452	45.181.452

Mengesah:
Koordipertanggung BKM



(Sd-Felan)

Sekretariat



(Sd-Felan)

REKAP NERACA UPL
BKM MUGI RAHAYU DESA SOKARAJA LOR
PERIODE TAHUN 2020

No. Akun	Nama Akun	Bulan:											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
11 01	Kas	Rp. 5.685.600	2.644.500	3.629.600	5.093.600	6.173.500	7.233.600	537.600	1.993.500	3.535.600	5.104.600	6.342.600	26.600
11 02	Bank UPL	Rp.											
11 03	Pinjaman KSM	Rp. 60.381.500	58.981.000	58.000.900	56.659.300	55.601.000	54.558.800	61.349.900	60.007.100	58.609.700	57.185.400	56.007.700	52.366.100
11 04	Cadangan Resiko Kredit	Rp.											
11 05	Pinjaman Lain-lain	Rp.											
11 06	Inventaris dan harta tetap	Rp.											
11 07	Akumulasi penyusut inv & harta tetap	Rp.											
	Jumlah :	Rp. 66.067.100	61.625.600	61.630.500	61.751.900	61.774.600	61.792.400	61.887.500	62.000.700	62.145.300	62.290.000	62.350.300	62.392.700
	PASSIVA :												
2 1	Dana prasarana dari laba UPK	Rp. 15.703.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000	11.203.000
2 2	Dana BOP untuk Sekretaris 60 %	Rp.											
2 3	Modal awal dana bergulir	Rp. 45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000	45.790.000
2 4	Modal PNPMP	Rp.											
2 5	Pemupukan Modal dan Laba 40 %	Rp. 4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400	4.564.400
2 6	Laba bulan berjalan	Rp. 9.700	9.700	68.200	73.100	194.500	217.200	235.000	330.100	443.300	587.900	732.600	792.900
2 7	Laba Bulan ini	Rp. 9.700	58.500	4.900	121.400	22.700	17.800	95.100	113.200	144.600	144.700	60.300	42.400
	Bilangan Lebaran												
	Jumlah :	Rp. 66.067.100	61.625.600	61.630.500	61.751.900	61.774.600	61.792.400	61.887.500	62.000.700	62.145.300	62.290.000	62.350.300	62.392.700

Mengetahui:
Koordinator Anggota BKM

(Imam Tri Warsono Spd)



**REKAP NERACA UPS
BKM MUGI RAHAYU DESA SOKARAJA LOR
PERIODE TAHUN 2020**

No. Akun	Nama Akun	Bulan:												Saldo Awal
		Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
11.01	Kas	Rp. 3.392.500	2.258.000	1.150.000	5.507.000	122.000	658.500	712.000	969.000	814.000	5.083.000	435.000	227.000	
11.02	Simpanan UPS di Bank	Rp. 20.015.701	30.316.761	34.572.659	34.579.937	42.387.837	45.098.139	52.112.221	56.127.719	51.744.959	21.158.784	35.190.119	19.362.772	
11.03	Piutang Dana Sosial	Rp. 89.200.780	79.615.299	76.588.290	72.521.255	59.951.299	53.965.299	59.981.299	55.886.299	51.542.299	37.260.299	33.526.299	34.562.299	
11.04	Cadangan Resiko Kredit (CRK)	Rp. 179.441	222.441	265.441	328.441	179.441	371.441	414.441	457.441	543.441	543.441	590.441	590.441	
11.05	Pinjaman Lain-lain													
11.06	Inventaris dan harta tetap													
11.07	Akumulasi penyusut inv & harta tetap													
	Jumlah:	Rp. 112.429.550	111.967.610	112.025.502	112.279.785	112.481.686	112.380.884	112.451.050	112.526.564	112.957.805	112.858.613	113.540.858	113.541.821	
	PASSIVA:													
2.1	Dana prasarana d'ri laba UPK	Rp. 15.424.012	14.924.012	14.924.012	14.924.012	14.924.012	14.924.012	14.924.012	14.924.012	14.924.012	14.924.012	14.924.012	14.924.012	
2.2	Dana BOP untuk Sekretaris 60 %	Rp. 2.268.784	2.268.784	2.268.784	2.268.784	2.268.784	2.268.784	2.268.784	2.268.784	2.268.784	2.268.784	2.268.784	2.268.784	
2.3	Modal awal dana bergulir	Rp. 84.273.544	84.273.544	84.273.544	84.273.544	84.273.544	84.273.544	84.273.544	84.273.544	84.273.544	84.273.544	84.273.544	84.273.544	
2.4	IPTW	Rp. 770.345	770.345	770.345	770.345	770.345	770.345	770.345	770.345	770.345	770.345	770.345	770.345	
2.5	Pemupukan Modal dan Laba 40 %	Rp. 9.661.765	9.661.765	9.661.765	9.661.765	9.661.765	9.661.765	9.661.765	9.661.765	9.661.765	9.661.765	9.661.765	9.661.765	
2.6	Labu bulan berjalan	Rp. 31.090	31.090	69.150	127.042	530.326	414.226	482.524	552.590	628.104	1.059.345	1.060.153	1.142.399	
2.7	Labu Bulan ini	Rp. 31.090	38.060	57.892	254.284	52.900	68.238	70.066	75.514	431.241	308	82.248	762	
	Jumlah:	Rp. 112.429.550	111.967.610	112.025.502	112.279.785	112.481.686	112.380.884	112.451.050	112.526.564	112.957.805	112.858.613	113.540.858	113.541.821	

Mengetahui:
Koordinator Anggota BKM



(Imam Tri Warsono, Spd)



(Supriyati)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Imam Triwarsono (Pimpinan BKM Mugi Rahayu)



Wawancara dengan ibu Nor Setiani (Manager UPK BKM Mugi Rahayu)



Wawancara dengan ibu Siti Fatiah (Sekertaris BKM Mugi Rahayu)



Wawancara dengan ibu Supriyati (Manager UPS BKM Mugi Rahayu)



Pemberian Sembako BKM Mugi Rahayu



Pelatihan Pembuatan Kerajinan Pada BKM Mugi Rahayu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Farda Nurjanah
NIM : 1423203094
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 22 Desember 1995
Alamat Rumah : Jl. Imam Bonjol no.28, Sokaraja Lor Rt004/002.
Nama Orang Tua : Ayah : Achmad Mu'Tamar
Ibu : Khafsah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK PERTIWI SOKARAJA LOR : 2001
2. SD NEGERI SOKARAJA LOR : 2001-2007
3. SMP NEGERI 3 KALIBAGOR : 2007-2010
4. MAN 2 BANYUMAS : 2010-2013
5. IAIN PWT : 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. KMPA "FAKTAPALA" IAIN PURWOKERTO
2. KSEI IAIN PURWOKERTO.
3. URUP PROJECT
4. PENAMAS
5. KSR MARKAS PMI BANYUMAS 2018
6. KARANGTARUNA YUDHA 7 SOKARAJA LOR
7. ODOJ BANYUMAS

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 23 Juni 2021

Penulis,



Farda Nurjanah
NIM: 1423203094